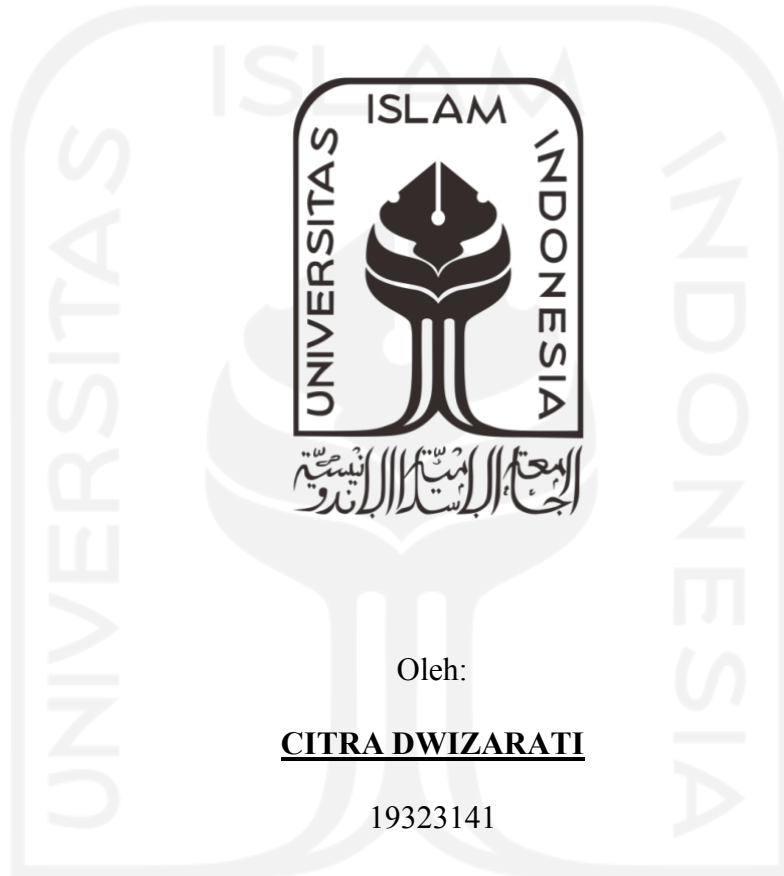


**ANALISIS *DECISION MAKING PROCESS* TERHADAP REFORMASI  
KEBIJAKAN PEMBATAAN PEKERJA ASING DI JEPANG  
ERA SHINZO ABE 2012-2020**

**SKRIPSI**



Oleh:

**CITRA DWIZARATI**

19323141

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**ANALISIS *DECISION MAKING PROCESS* TERHADAP REFORMASI  
KEBIJAKAN PEMBATAAN PEKERJA ASING DI JEPANG  
ERA SHINZO ABE 2012-2020**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**Citra Dwizarati**

19323141

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**ANALISIS *DECISION MAKING PROCESS* TERHADAP REFORMASI  
KEBIJAKAN PEMBATAAN PEKERJA ASING DI JEPANG  
ERA SHINZO ABE 2012-2020**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional




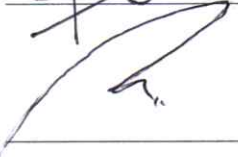
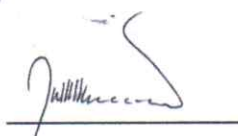
Ketua Prodi Studi

  
Karina Utami Dewi S.IP. M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A.
- 2 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 3 Willi Ashadi, S.H.I., M.A.

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*05 April 2023,*



SEPUKUH RIBUAN  
1000  
METERAI  
TEMPERAN  
89AKX353715580

*Citra Dwizarati*

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b>	<b><i>i</i></b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b><i>iii</i></b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	<b><i>iv</i></b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b><i>v</i></b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Cakupan Penelitian .....	8
1.5 Tinjauan Pustaka .....	8
1.6 Kerangka Pemikiran .....	11
1.7 Argumen Sementara .....	16
1.8 Metode Penelitian .....	17
1.8.1 Jenis Penelitian .....	17
1.8.2 Subje dan Objek Penelitian Metode Pengumpulan Data .....	17
1.8.3 Metode Pengumpulan Data .....	18
1.8.4 Proses Penelitian .....	18
1.9 Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB 2</b>	<b><i>17</i></b>
2.1. Non-Human Environment.....	17
2.2. Society .....	21
2.3. Human Environment .....	28
<b>BAB 3</b>	<b><i>34</i></b>
3.1. Major Common Value Orientation .....	34
3.2 Major Institutional Patterns .....	35
3.3. Major Characteristic of Social Organization .....	37
3.4 Role Differentiations and Specialization .....	38
3.5. Groups Kind and Function .....	39
3.6 Relevant Social Process .....	40
3.6.1 Opinion Formation .....	40
3.6.2 Adult Socialization .....	41
3.6.3 Political .....	41
<b>BAB 4</b>	<b><i>44</i></b>
<b>EXTERNAL SETTING</b>	<b><i>44</i></b>
4.1 Non-Human Environment.....	44
4.2 Other Culture .....	46

4.3 Other Societies.....	48
4.4. Societies Organized and Functioning as States Government Action ..	50
5.1 Kesimpulan .....	52
5.2 Rekomendasi.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>58</b>



## DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Tabel 1. Indikator Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri.....	14
Tabel 2. Jumlah Penggunaan Robot.....	22
Tabel 3 Jumlah Pekerja Illegal di Jepang.....	28
Tabel 4. Jumlah Populasi Perempuan di Jepang.....	33
Tabel 5. Jumlah Populasi Laki-Laki di Jepang.....	33
Tabel 6. Jumlah Populasi Pekerja Asing di Jepang.....	34
Tabel 7. Konsep Snyder Sebagai Model Penelitian.....	56



## ABSTRAK

Krisis demografis yang tengah dihadapi Jepang sejak lama, menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang mempengaruhi produktivitas dan perekonomian negara menjadi tantangan bagi Jepang dalam mengatasi isu tersebut. Keterbukaan dan ketatnya kebijakan terkait pekerja asing di Jepang menuai kontroversial. Sehingga pada akhirnya melalui berbagai proses pengambilan keputusan, pemerintah Jepang melakukan reformasi kebijakan pekerja asing di era Shinzo Abe. Tujuan penulisan untuk menjelaskan berbagai faktor pendorong dalam reformasi kebijakan pembatasan pekerja asing di Jepang era Shinzo Abe. Penulis menemukan kecocokan dengan teori *decision making process* Snyder bahwa faktor internal, eksternal dan *social structure & behavior* sesuai dengan proses pengambilan keputusan pemerintah Jepang di bawah Shinzo Abe.

**Kata Kunci: Krisis Demografis, Reformasi Kebijakan Pekerja Asing, *Decision Making Process*, Abe, Pekerja Asing Jepang**

## ABSTRACT

*The demographic crisis that Japan has been facing for a long time has caused a shortage of labor which has affected productivity and the country's economy, which has become a challenge for Japan in overcoming this issue. Its openness and strict policies regarding foreign workers in Japan have been controversial. So that in the end, through various decision-making processes, the Japanese government carried out a policy of reforming foreign workers in the Shinzo Abe era. The purpose of writing is to explain the various driving factors in the reform of the foreign worker execution policy in Japan under Shinzo Abe. The author finds compatibility with Snyder's decision-making process theory that internal, external and social structure & behavior factors are in accordance with the decision-making process of the Japanese government under Shinzo Abe.*

**Key Words: Demographic Crisis, Foreign Worker Policy Reform, *Decision Making Process*, Abe, Japanese Foreign Workers**



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hubungan politik luar negeri sangat dibutuhkan dalam mencapai kepentingan nasional (Banyu Perwita & Yani, 2017). Ketergantungan dalam membutuhkan satu sama lain dalam aspek ekonomi, politik maupun perdagangan. Kebijakan migrasi diperlukan dalam aspek ekonomi, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan antar negara untuk mencapai tujuan masing-masing dalam memperoleh devisa negara. Migrasi sebagai dari bagian dalam mempengaruhi perubahan angka penduduk, yang mana sangat dibutuhkan keterlibatannya dalam menstabilkan populasi. Negara sebagai aktor tentunya dalam meningkatkan pembangunan negara dan keamanan pekerja Jepang telah bekerja sama dengan sejumlah organisasi dan perjanjian internasional.

Jepang sebagai negara maju memiliki penduduk yang cukup besar, cenderung dihadapi oleh fenomena sosial. *Shoushika* yang dikenal sebagai krisis demografis Jepang, krisis serius yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi budaya dan tradisi masyarakat setempat yang dipengaruhi oleh gaya hidup modern. Salah satu faktor diantaranya kemajuan teknologi dan obat-obatan, yang berperan dalam memajukan negara yaitu pil keluarga berencana (KB) yang dapat diakses dengan mudah sehingga menghambat kelahiran. Selain itu dengan adanya kebijakan *Womenomic* atas keterlibatan peran wanita dalam pekerjaan menjadi tidak tertarik dalam menjalin hubungan rumah tangga yang membutuhkan cukup biaya dan

konsep keluarga tradisional yang kuno, sehingga cenderung berfokus menjadi wanita karir.

Selain itu terdapat sejumlah fenomena yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dalam negeri, di antaranya menurunnya produktivitas anak muda. Budaya kerja yang keras dan senioritas mengharuskan bawahan untuk loyal kepada atasan dan perusahaan. Sehingga membatasi tingkat kreativitas bagi anak muda yang cenderung tidak bebas. Tingginya biaya hidup di negara maju, sehingga anak muda tidak ingin memiliki keturunan. Penduduk lanjut usia yang mendominasi tampaknya tidak menjadi halangan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan dengan membuka lapangan kerja dan memperpanjang masa pensiun dari 65 tahun menjadi 70 tahun (Br Karo et al., 2021). Menjadikan peran warga lokal Jepang dalam ketenagakerjaan regional tidak dapat memenuhi target capaian ekonomi, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Oleh karena itu dengan menurunnya produktivitas oleh anak muda, menjadikan Jepang harus mencari cara dalam mengupayakan sumber daya manusia. Untuk menanggapi isu yang telah terjadi sejak lama, Jepang mulai terbuka terhadap pekerja asing. Akan tetapi ketatnya kebijakan pekerja asing Jepang selama 30 tahun lamanya mempengaruhi kurangnya tenaga kerja asing. Perdana menteri Jepang yang selalu berganti tiap tahunnya, sehingga kebijakan terkait pekerja asing belum dapat memberikan perubahan yang signifikan untuk menutupi kekurangan ketenagakerjaan.

Pada saat yang bersamaan Jepang pernah mengalami masa *golden years*, yang mana mengalami masa kebangkitan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesuksesan tersebut menjadi peluang bagi pekerja asing untuk mencari pekerjaan di Jepang. Jepang sebagai negara industri tentunya membutuhkan karyawan yang kompeten, akan tetapi hal tersebut tidak dapat menjadi solusi saat ini. Pada umumnya industri di Jepang menganggap isu kekurangan tenaga kerja bukan sebagai suatu masalah, tetapi hanya pada sebagian industri tertentu yang dipengaruhi oleh minimnya tenaga kerja asing (SAITO 2022).

Secara historis jauh sebelum kedudukan Shinzo Abe, pemerintah Jepang sudah mempertahankan kebijakan dalam membatasi masuknya tenaga kerja asing yang tidak terampil dan adanya pekerja berstatus ilegal. Pada 1951 Undang-undang Kemigrasian Pasal 1, bertujuan untuk memberikan kontrol yang adil atas masuk dan keluarnya semua orang dari Jepang. Pada 1989, untuk meningkatkan kembali masuknya pekerja asing, pemerintahan Jepang melakukan amandemen Undang-undang terkait kemigrasian yaitu The 1989 Amendment to the Immigration Control Act (ICA) yang dipimpin oleh Toshiki Kaifu (Saito 2022). Akan tetapi kebijakan tersebut membatasi bahwa pekerja asing hanya dapat tinggal sementara di Jepang.

Semenjak kepemimpinan Shinzo Abe pada periode pertama, angka demografis Jepang semakin menurun dan tidak stabil tiap tahunnya. Pada 2012, tercatat jumlah penduduk Jepang pada saat itu sebesar 127,6 juta termasuk imigran. Jumlah populasi Jepang yang tidak seimbang didominasi oleh penduduk lanjut usia

dan angka kematian yang meningkat, sementara diikuti oleh rendahnya angka kelahiran (Kusuma Pratiwi, 2007). Sementara jumlah imigran yang dibutuhkan tidak sesuai untuk menutupi kekurangan tenaga kerja. Urgensi yang dialami Jepang dalam memenuhi kestabilan demografis menjadi tantangan dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yang dapat mengancam keamanan nasional. Sedangkan kebijakan ketenagakerjaan Jepang sebagai negara industri memiliki standar yang tinggi dalam membutuhkan pekerja yang mana memiliki keterampilan khusus, sehingga sulit untuk menemukan pekerja yang sesuai dengan kualifikasi tersebut. Tindakan tersebut dilakukan untuk memperkuat kembali daya saing para pekerja asing secara global. Sehingga keberadaan pekerja asing yang terampil tidak hanya dapat menstabilkan jumlah populasi penduduk, tetapi juga dapat meningkatkan kembali ekonomi yang sempat menurun (Oishi 2012).

Keterbukaan Jepang terhadap keberadaan pekerja asing dan kebijakan terkait ketenagakerjaan yang ketat menuai kontroversial. Kebijakan pemerintah Jepang dikritisi dan dianggap radikal, yang mana cenderung menyulitkan pekerja dan merupakan solusi yang bersifat sementara. Tidak hanya itu, kebijakan tersebut dikritisi oleh partai oposisi Jepang yaitu Partai Demokrat yang bahkan mencoba untuk mencegah kebijakan tersebut berjalan. Selain itu terdapat partai politik yang menolak terhadap perubahan yang cukup besar dalam menerima pekerja asing. Sejumlah penolakan tersebut menjadikan Abe melakukan pemungutan suara pada masyarakatnya, hasil dari koalisi tersebut menjadi prioritas bagi Abe pada saat itu dalam membatasi kebijakan tenaga kerja asing. Kebijakan yang membatasi

masuknya pekerja asing di Jepang, semakin mempengaruhi kondisi Jepang yang semakin kekurangan ketenagakerjaan. Untuk menutupi kekosongan ketenagakerjaan pemerintah Jepang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian dengan memperbaiki kebijakannya. Salah satunya keberadaan perempuan di dunia kerja yang sangat minimal, sehingga dibentuk kebijakan *womenomic* sebagai salah satu upaya Jepang untuk memberikan kesempatan bagi perempuan terlibat dalam pekerjaan. Akan tetapi berbagai upaya domestik tersebut tidak cukup untuk mengatasi isu demografis. Kondisi sosial yang tidak relevan untuk memenuhi kebutuhan SDM terhadap tenaga kerja asing, sehingga pemerintah Jepang melakukan reformasi kebijakan pekerja asing untuk tetap dapat menerima kebutuhan Jepang terhadap tenaga kerja asing.

Pada 2012, strategi revitalisasi dengan merevisi kebijakan dasar terkait program pelatihan dan bagi pekerja yang memiliki keterampilan khusus disediakan lingkungan kerja yang baik. Pada 2016, berdasarkan *Japan Immigration Control Act* (ICA) yang menetapkan prosedur dalam menerima tenaga kerja asing dengan 3 kategori utama di antaranya yaitu mempromosikan penerimaan tenaga kerja asing dengan keterampilan khusus, program pelatihan praktik pekerja, tanggapan terhadap masyarakat internasional dan situasi internasional melalui *Economic Partnership Agreement* (EPA).

Pada 2018 Jepang melakukan reformasi kebijakan dalam menerima pekerja asing yang memiliki keterampilan khusus *Specific Special Worker* (SSW), yang mana pekerja asing dengan keterampilan khusus diterima tanpa adanya pelatihan

khusus dapat diterima di Jepang. Reformasi kebijakan tenaga kerja asing berdasarkan beberapa poin yang ideal untuk dapat diterima sesuai kualifikasi tertentu. Reformasi kebijakan tenaga kerja asing menggunakan sistem kontrol migrasi preferensial dengan menerapkan dua kategori visa pada pekerja asing. Pertama, bagi pekerja asing yang tidak memiliki keterampilan khusus bahwa visanya hanya berlaku selama 5 tahun. Sedangkan yang kedua, bagi pekerja asing yang memiliki keterampilan khusus dapat memperpanjang visanya dan membawa keluarga untuk tinggal di Jepang yang mana mendapatkan perlakuan yang istimewa. Sistem kontrol migrasi tersebut sebagai bentuk promosi dalam menerima keberadaan pekerja asing untuk terlibat dalam meningkatkan ekonomi Jepang. Akan tetapi kebijakan ketenagakerjaan terkait pekerja asing tetap ada yang membatasi bagi pekerja asing pekerja yang tidak memiliki keterampilan khusus hanya dapat tinggal secara sementara di Jepang.

Selama kepemimpinan Abe, kebijakan terkait pekerja asing mempengaruhi dinamika politik Jepang yang mana terdapat kepentingan nasional terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan domestik. Masyarakat sosial yang menjadi faktor pendorong dalam pengambilan keputusan kebijakan internasional. Upaya yang dilakukan Jepang terkait kebijakan luar negeri hanya untuk jangka pendek, yang mana kedepannya akan menghambat perekonomian nasional bagi generasi muda mendatang sehingga menjadi tantangan bagi Jepang untuk mencari solusi jangka panjang demi mengatasi krisis populasi yang menyusut dan menua menjadi yang tengah dihadapi.

Untuk mengatasi krisis demografis yang tengah dihadapi, menjadi tanggung jawab pemerintah Jepang dengan melakukan berbagai bentuk upaya yang dilakukan Shinzo Abe dengan membentuk kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri untuk mengatasi krisis pekerja. Akan tetapi sebagian masyarakat Jepang enggan menerima masyarakat asing, sehingga Abe melaksanakan koalisi pada masyarakat. Penolakan tenaga kerja asing tersebut bertolak belakang dengan kebutuhan Jepang. Sehingga, berbagai macam faktor yang tengah dihadapi pemerintah Jepang dalam mencoba berbagai cara untuk mengatasi krisis demografis sebagai bentuk proses dalam pembentukan kebijakan luar negeri.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengapa Shinzo Abe Mereformasi Kebijakan Pembatasan Pekerja Asing di Jepang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas riset ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa faktor pendorong dalam mereformasi kebijakan pembatasan pekerja asing di Jepang era Shinzo Abe 2012. Selama kedudukan Abe dalam rentan waktu 2012 hingga 2020, pemerintahan Abe melaksanakan berbagai upaya kebijakan untuk mempertahankan keberadaan pekerja asing. Selain itu untuk mengetahui alasan dibalik kebijakan pembatasan pekerja asing oleh pemerintah Jepang. Selain itu menjelaskan dampak dari dibentuknya kebijakan tersebut dalam membatasi masuknya pekerja asing. Melihat kebijakan tersebut kontradiksi dengan

kebutuhan Jepang saat ini. Sedangkan mengetahui pengaruh identitas Jepang yang homogen dalam mempengaruhi dibentuknya kebijakan pembatasan pekerja asing. Sehingga penelitian ini penting dan layak untuk diteliti.

#### **1.4 Cakupan penelitian**

Untuk menjaga penelitian tetap fokus, maka dibatasi oleh upaya Jepang dalam perkembangan kebijakan pada masa pemerintahan Shinzo Abe pada 2012 sampai dengan akhir kedudukannya pada tahun 2019. Pada 2012, pertama kalinya bagi Abe merevisi kebijakan program pelatihan yang dikenal dengan strategi revitalisasi untuk meningkatkan lingkungan pekerja asing dengan status pelatihan. Pada 2018, pemerintah Jepang merevisi kembali kebijakan tenaga kerja asing yang mana tidak lagi membedakan pekerja asing berdasarkan 2 kategori. Sehingga dengan keluarnya kebijakan ini, menjadi harapan untuk mengisi kekosongan ketenagakerjaan. Oleh karena itu meskipun terdapat berbagai upaya, dinamika terkait kebijakan pekerja asing masih berlangsung sampai dengan berakhirnya kedudukan Abe pada 2020.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Peneliti menyusun tinjauan pustaka menggunakan literatur kebijakan luar negeri yang terdapat dalam buku yang berjudul Pengantar Hubungan Internasional yang ditulis oleh Banyu Perwira. Aktor negara menggunakan kebijakan politik luar negeri dengan melibatkan aspek internal maupun eksternal, demi tercapainya tujuan dalam kepentingan nasional. Tujuan yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang (Banyu Perwira 2006). Buku ini digunakan untuk menganalisa studi kasus dan perkembangan kebijakan pembatasan pekerja asing di Jepang. Pada



dasarnya kebijakan luar negeri menjadi dasar pengambilan keputusan bagi aktor negara. Sehingga kebijakan luar negeri Jepang untuk membatasi penerimaan pekerja asing demi keamanan dan kepentingan nasional. Melihat tindakan Jepang terhadap pembatasan pekerja asing, yang mana kebijakan tersebut digunakan untuk jangka pendek. Kebijakan luar negeri digunakan sebagai alat negara dalam menanggapi dan mempertimbangkan masalah yang tengah dihadapi Jepang, sehingga upaya yang dilakukan oleh pemerintah Shinzo Abe bahwa terdapat kepentingan demi keamanan nasional.

Peneliti kedua dalam jurnal yang berjudul Kebijakan Pengendalian Imigrasi Sebagai Opsi Strategis Terhadap Fenomena Penuaan Populasi di Jepang yang ditulis oleh Kusuma, fokus peneliti ini menyatakan bahwa kebijakan imigrasi di Jepang dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan hubungan internasional yang mempengaruhi pembatasan kebijakan pekerja asing di Jepang. Pada 2012, dapat dilihat jumlah populasi Jepang yang tidak seimbang didominasi oleh penduduk lanjut usia dan angka kematian yang meningkat, sementara diikuti oleh rendahnya angka kelahiran yang mempengaruhi pembatasan kebijakan pekerja asing di Jepang (Kusuma Pratiwi 2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis di fokus pembahasan.

Dalam jurnal ketiga yang berjudul Fenomena Shoushika: Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe yang ditulis oleh Karo dkk (2021), menuliskan bahwa fenomena terhadap perubahan demografis yang menjadi tantangan saat ini bagi Jepang. Sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap kebijakan domestik. Salah satunya dengan Abenomic. Jurnal ini menggunakan teori Copenhagen School oleh Barry

Buzan, yang mana fenomena yang dialami Jepang merupakan isu keamanan non-tradisional. Adanya permasalahan pada sektor sosial yang mempengaruhi perekonomian Jepang. Pada dasarnya kesejahteraan masyarakat yaitu bebas dari ancaman keamanan terutama bagi tenaga kerja. Akan tetapi populasi Jepang semakin menurun dan didominasi oleh masyarakat lansia sehingga mempengaruhi perekonomian negara akibat kekurangan tenaga kerja (Br Karo et al. 2021).

Keempat, dalam jurnal yang berjudul *Restricted Regular Employees and Compensating Wage Differentials: Theory and Evidence*. yang dituliskan oleh Usui (2015), Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yang mana jurnal tersebut berfokus pada adanya perbedaan upah terhadap karyawan tetap dan biasa. Regulasi tersebut yang juga mempengaruhi masyarakat lokal khawatir terhadap keberadaan masyarakat asing yang diutamakan seperti mendapatkan jaminan sosial dan lainnya.

Dalam jurnal yang berjudul *The Current Issues on Foreign Workers in Japan* yang dijelaskan oleh Yamada, bahwa Jepang sebagai negara industri memperketat penerimaan pekerja asing yang diatur dalam Undang-undang Tindakan Ketenagakerjaan untuk menghindari penerimaan pekerja yang tidak memiliki kemampuan sesuai standar, sehingga tidak ada standar ganda terhadap perbedaan pekerja lokal dan asing. Pada 2004 JTUC-Rengo sebagai pusat serikat pekerja nasional terbesar di Jepang. Melihat ketatnya penerimaan orang asing dengan sejumlah ketentuan, JTUC-Rengo menyarankan untuk menetap status bagi pekerja asing untuk mendapatkan upah yang sama dengan masyarakat lokal. Sehingga tidak lagi terdapat kesenjangan atau perbedaan upah dan akan

menghilangkan rasa kekhawatiran masyarakat lokal terhadap keberadaan masyarakat asing (Yamada 2010).

Sejumlah peneliti tersebut membahas berbagai bentuk upaya dalam menanggapi isu demografis dan tenaga kerja asing. Penelitian diatas cenderung membahas upaya Jepang dalam menghadapi isu demografis, keadaan sosial Jepang dan adanya tanggapan LSM terhadap kebijakan. Sedangkan dalam penelitian ini akan berbeda dari literatur diatas, yang mana penelitian ini akan berfokus pada proses pembuatan kebijakan pembatasan pekerja asing di Jepang. Dengan menggunakan model decision making process untuk menganalisis langkah apa yang mempengaruhi Jepang dalam mengambil keputusan

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Peneliti menyusun kerangka pemikiran dalam menggunakan teori oleh Richard Snyder yaitu kebijakan luar negeri dalam proses pengambilan keputusan kebijakan suatu negara berdasarkan faktor utama yaitu internal maupun eksternal dan perilaku & struktur sosial menjadi penyebab yang mendorong negara dalam mengambil keputusan (Snyder, Bruck, and Sapin 2002).

### **Setting Internal**

Menurut Snyder bahwa faktor internal dipengaruhi oleh opini dan sikap publik. Tindakan tersebut sebagai faktor penting dalam mengambil keputusan. (Snyder, Bruck, and Sapin 2002).

- *Non-Human Environment*, merupakan suatu lingkungan yang bukan disebabkan oleh manusia yang dapat mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan melalui infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan masyarakat

di suatu negara. Kondisi ini sesuai dengan keadaan masyarakat Jepang yang kekurangan SDM, sehingga pemerintah Jepang membuat berbagai upaya untuk memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pekerja asing di Jepang yaitu perumahan pemerintahan, ahli bahasa, transport umum, dan robot.

- *Society*, kondisi sosial masyarakat yang dapat mempengaruhi bagaimana proses pembuatan kebijakan berjalan melalui respons berupa sikap dan opini terhadap kebijakan. Kondisi ini sesuai dengan keadaan masyarakat Jepang, di mana terdapat sebagian penduduk yang menolak keberadaan masyarakat asing.
- *Human Environment*, merupakan lingkungan yang berkaitan dengan manusia yang menjadi bagian dari faktor internal. Kondisi lingkungan yang berfokus pada manusia terutama masyarakat sebagai aktor yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Lingkungan tersebut terbagi menjadi dua faktor budaya dan populasi. Budaya tradisional yang sudah melekat pada masyarakat Jepang, sehingga sulit bagi masyarakat untuk menerima atau beradaptasi dengan adanya perbedaan budaya dari luar. Sedangkan populasi di Jepang yang semakin menurun setiap tahunnya menjadi masalah, sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah Jepang untuk mengatasi isu tersebut dengan menerima pekerja asing

### **Social Structure & Behavior**

Social structure & behavior, norma umum atau perilaku politik yang diterapkan di Jepang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Sehingga teori ini digunakan untuk menganalisis studi kasus dan perkembangan kebijakan

pembatasan pekerja asing di Jepang yang dipengaruhi oleh enam faktor. *Major Common Value*, nilai umum yang menjadi orientasi yang diterapkan masyarakat dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Di mana nilai konfusius yang dianut masyarakat Jepang mempengaruhi bagaimana sikap masyarakat terhadap suatu kebijakan. *Major Institutional Pattern*, pola kelembagaan utama yang berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Liberal Democratic Party sebagai partai yang mendominasi politik yang berfokus pada nilai demokrasi yang cenderung memprioritaskan suara masyarakat. *Major Characteristic of Social Organization*, karakter utama organisasi sosial berdasarkan nilai yang dianut dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Organisasi sosial di Jepang sering kali memiliki peran dalam proses pembuatan kebijakan, JICA dan Nippon-Keidanren sebagai organisasi yang memberikan bantuan terhadap masyarakat domestik maupun internasional. *Role Differentiations and Specialization*, perbedaan peran dan spesialisasi yang mempengaruhi suatu kebijakan terbentuk. Adanya perbedaan peran antara perusahaan swasta dan pemerintah dalam bekerja sama untuk meningkatkan pembangunan melalui robot. *Group Kind and Function*, berbagai macam kelompok dengan fungsi yang berbeda memiliki peran dalam mempengaruhi proses kebijakan suatu negara. *Relevant Social Process*, merupakan proses sosial yang relevan yang terbagi menjadi 3 variabel dalam merumuskan pembuatan kebijakan melalui pembentukan opini masyarakat, sosialisasi dan politik. Secara politik tentunya suara partai mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Pada kasus ini, salah satu partai politik oposisi cenderung menolak keberadaan tenaga kerja asing.

## Setting External

Berdasarkan pandangan Snyder faktor eksternal yang memberikan reaksi terhadap proses pembentukan kebijakan yang mempengaruhi kebijakan suatu negara terhadap kritikan atau kecaman. Meskipun ada reaksi dari luar terkait kebijakan maka negara tidak selalu mengambil tindakan lebih lanjut atas reaksi tersebut.

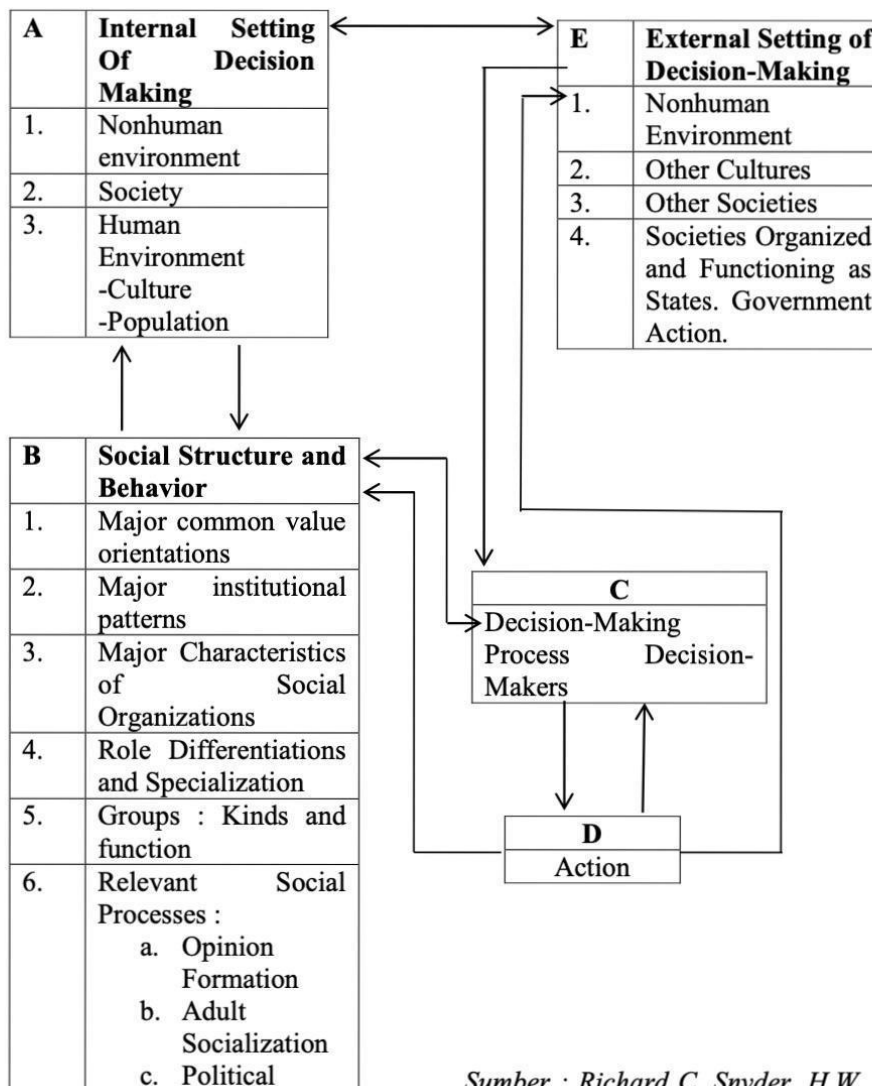
- *Non-Human Environment*, kondisi yang berasal dari luar negara dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Dalam kasus Jepang, kondisi Jepang yang membutuhkan tenaga kerja asing, sedangkan kondisi negara lain yang membutuhkan pekerjaan akan saling melengkapi satu sama lainnya. Sehingga muncul kerjasama antar negara.
- *Other Culture*, perbedaan budaya dari luar yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan suatu negara. Budaya tradisional yang perlahan berubah melalui budaya yaitu budaya kesetaraan gender yang dikenal dengan kebijakan *womenomic*.
- *Other Society*  
Kondisi program kerja di Jepang mempengaruhi respons dari luar, yang mana penulis menekankan adanya kritikan oleh sejumlah negara terhadap keputusan pemerintah Jepang dalam proses terbentuknya kebijakan pembatasan pekerja asing terhadap ketatnya hukum ketenagakerjaan dan birokrasi Jepang.
- *Societies Organized and Function as States and Government Action*  
menghasilkan sebuah aksi atau tindakan pemerintah dalam merespons isu yang dihadapi negaranya. Kebijakan program pekerja di Jepang menuai

kritikan, sehingga pemerintah Jepang berupaya merespons hal tersebut dengan memperbaiki program pekerja nya.

Sehingga ketiga faktor kebijakan luar negeri tersebut menjadi landasan dalam penerapan teori, yang mana mewakili fenomena sosial yang terjadi di Jepang dalam proses terbentuknya kebijakan pekerja asing hingga menjadi sebuah aksi atau tindakan pemerintah Jepang dalam memutuskan kebijakan.



**Tabel 1. Indikator Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri**



Sumber : Richard C. Snyder, H.W.

Sumber: (Richard Snyder, 2002)

### 1.7 Argumen Sementara

Jepang sebagai negara industri membatasi pekerja asing demi kepentingan nasional negaranya, tindakan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu internal dan eksternal yang mana mendorong aktor dalam mengambil keputusan. Bahwa *decision making process* yang digunakan oleh Jepang di era Abe memenuhi variabel internal, eksternal dan sosial dari teori Snyder. Dalam faktor internal, opini



dan sikap masyarakat mempengaruhi proses dalam pembuatan kebijakan yang menjadi prioritas pemerintah Jepang. Kemudian faktor eksternal, adanya kritikan terkait kebijakan pembatasan pekerja asing oleh pihak luar. Sedangkan *social structure & behavior*, norma umum atau perilaku politik yang diterapkan di Jepang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Secara hipotesis penulis menyatakan bahwa pembatasan pekerja asing pada era Abe dilakukan untuk menjaga kepercayaan sosial masyarakat Jepang.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu kualitatif. Metode yang berfokus pada perbandingan studi kasus melalui perspektif penduduk Jepang yang relevan dengan studi Hubungan Internasional. Untuk memperoleh hasil rumusan masalah, diperlukan analisis yang bersifat deskriptif melalui ide yang dituangkan dalam penelitian.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Penelitian mengambil subjek berdasarkan sikap dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Jepang dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi krisis menyusut dan menuanya demografis. Objek dari penelitian ini adalah proses pembuatan kebijakan yang mempengaruhi dibentuknya kebijakan pembatasan pekerja asing di Jepang era Shinzo Abe 2012-2020.

### 1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder yaitu studi pustaka dengan membaca maupun mengutip dari buku, jurnal, artikel berita maupun *website* yang kredibilitas sesuai dan terjamin.

### 1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak Maret 2022. Proses penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan segala sumber yang dapat membantu dalam melengkapi penelitian. Selanjutnya dengan meninjau kembali berbagai sumber yang ada sehingga dapat mendukung penelitian. Dengan menganalisis data digunakan demi memberikan kebenaran lapangan melalui sumber yang relevan. Penelitian ini akan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena penelitian ini akan melihat permasalahan yang ada dengan sudut pandang yang berbeda.

## 1.9 Sistematika Pembahasan

Bab pertama akan menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, cakupan penelitian, tujuan penelitian, kerangka pemikiran atau landasan teori, kajian pustaka, dan metodologi. Bab kedua akan menjelaskan indikator *internal setting* atau faktor internal yang memberikan pengaruh terhadap Jepang dalam membatasi pekerja asing di era Shinzo Abe yang bertujuan untuk mengetahui alasan di balik Jepang mengambil keputusan tersebut. Bab ini berfokus dan menjadi landasan dalam mengaplikasikan teori yang akan dijelaskan pada bab tiga. Kemudian bab ketiga penulis akan memaparkan indikator *social structure & behavior* dalam teori Snyder yang mempengaruhi dan penerapannya terhadap kebijakan luar negeri. Pada

bab keempat, peneliti menuliskan indikator *eksternal setting* yang dirangkum menjadi kesimpulan dan saran melalui pembahasan penulisan yang kedepannya diharapkan dapat berguna bagi negara lainnya dalam mengambil keputusan.



**BAB 2**  
***INTERNAL SETTING* DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN**  
**PEMBATASAN PEKERJA ASING**  
**DI JEPANG**

Memasuki Bab 2, penelitian ini akan membahas lebih jauh faktor-faktor utama yang mendasari permasalahan yang menjadikan Jepang membatasi kebijakan tersebut. Terdapat tiga pembahasan yang akan dibahas dalam bab ini, pertama faktor internal yang melatarbelakangi dalam proses pembuatan kebijakan.

Berdasarkan sebagian indikator *internal setting* yang digunakan, hubungan antara masyarakat dan negara sangat berkaitan erat dalam proses pembuatan kebijakan domestik maupun luar negeri. Sejatinya, lingkungan sosial masyarakat sebagai alat dalam menunjang kehidupan di suatu negara yang juga terdiri dari budaya dan populasi. Meskipun adanya statement bahwa sejatinya Jepang membutuhkan keberagaman dengan menerima lebih banyak tenaga kerja asing. Akan tetapi, opini warga negara tetap menjadi *internal setting* atau faktor internal sebagai faktor pendorong kebijakan yang utama dalam proses pembuatan kebijakan dalam negeri.

**2.1. Non-Human Environment**

Berdasarkan faktor internal dari teori Richard Snyder, faktor internal menjadi faktor pendorong proses pengambilan keputusan (*Decision Making Process*) terkait suatu kebijakan. Non-Human Environment atau Lingkungan Bukan Manusia, merupakan objek yang dikembangkan melalui kecerdasan manusia yang dapat menunjang kegiatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur atau sebagai alat penunjang kegiatan masyarakat di suatu negara

(Qonita, 2019). Menurunnya angka demografis setiap tahunnya menjadi tantangan bagi Jepang dalam membutuhkan sumber daya manusia. Sehingga Jepang meningkatkan infrastrukturnya untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang terbatas. Jepang sebagai negara industri memiliki keunggulan yang pesat dibidang teknologi terutama dalam pembuatan robot. Keberadaan robot yang dapat mengganti peran manusia, menjadi salah satu sumber daya manusia (*non-human environment*) yang berkualitas. Selain itu adanya respons masyarakat menjadikan pemerintah Jepang mempertimbangkan kepentingan negara yang berawal dari kekhawatiran masyarakat atas keberadaan pekerja asing yang dianggap dapat terjadinya kejahatan. Sehingga keberadaan robot menjadi solusi yang lebih efisien dan dapat mengurangi angka kejahatan, yang mana tujuan Jepang untuk mempertahankan keamanan negara dan menjaga kepentingan nasional dapat tercapai dengan membatasi masuknya tenaga kerja asing di Jepang.

Pada kepemimpinan Shinzo Abe sebagai bentuk upaya meningkatkan produktivitas negara dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi Jepang dalam strategi revitalisasi ekonomi yang dikenal dengan Dewan Realisasi Revolusi Robot (*Realization Council of the Robot Revolution*). Kebijakan robot tersebut memiliki 3 pilar yaitu sebagai inovasi robot untuk memperkuat kreativitas, kemudian masyarakat dapat memaksimalkan dalam penggunaan robot untuk menunjang kehidupan sehari-hari dan strategi utama dunia untuk robot era baru (Bremner 2015). Keberadaan robot dianggap efisien dari segi biaya dan berguna dalam sektor industri seperti pelayanan publik di bidang kesehatan untuk kehidupan sehari-hari. Robot yang tidak hanya dapat menunjang kegiatan masyarakat, tetapi juga dapat

meningkatkan perekonomian negara dengan melakukan ekspor robot ke berbagai negara.

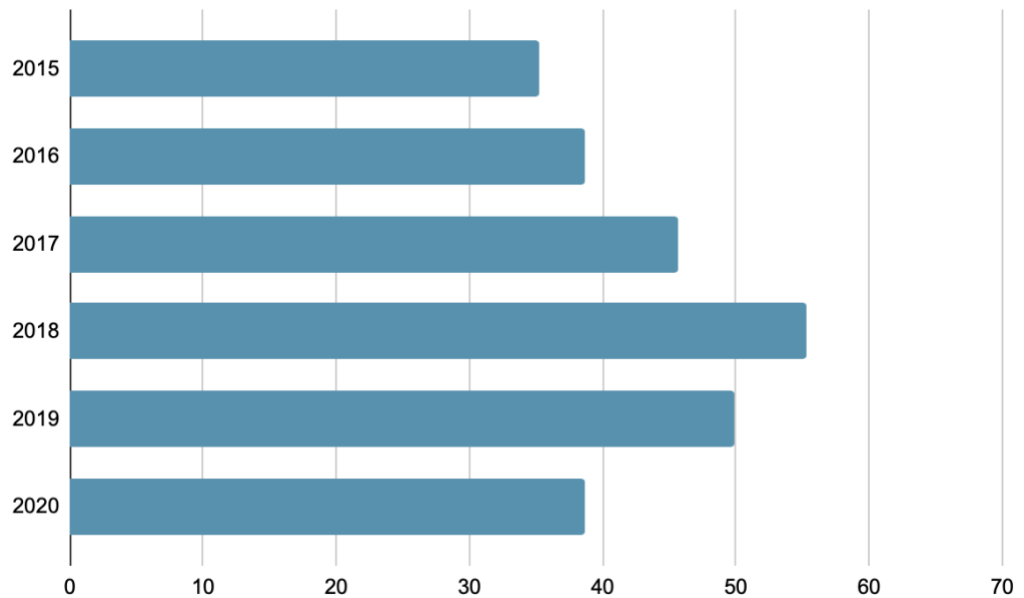
Pada 2016, populasi penggunaan robot sebesar 300 per 10.000 karyawan di Jepang. Pembangunan infrastruktur otomatisasi yang menggunakan AI terlibat dalam membantu pelayanan publik yang dapat mengatasi masalah isu sosial di Jepang. Pada dasarnya keterbukaan Jepang terkait kebijakan pekerja asing ditolak oleh sebagian masyarakat Jepang. Sehingga pemerintah Jepang mempertimbangkan kembali keputusan dalam menerima pekerja asing dengan jumlah yang banyak. Oleh karena kebutuhan Jepang terhadap sumber daya manusia, menjadi pendorong bagi Jepang untuk menciptakan inovasi melalui robotik. Robot sebagai salah satu infrastruktur untuk menunjang kehidupan Jepang, sehingga pemerintah Jepang tidak perlu pekerja asing dengan jumlah yang banyak (BBC 2020).

Selain itu prasarana yang paling umum digunakan masyarakat Jepang seperti kereta api dengan teknologi yang tinggi, sehingga dapat datang dengan tepat waktu dan harga yang ekonomis dapat mempermudah masyarakat untuk berangkat kerja. Kemudahan dalam menggunakan kereta api dapat menampung penumpang sebesar 48% pekerja yang menggunakan kereta api untuk berangkat kerja. Meskipun dengan kapasitas sebesar, akan tetapi banyaknya penduduk yang menggunakan transportasi umum tersebut sulit untuk mendapatkan tempat duduk selama perjalanan.

Kemudian secara infrastruktur Jepang telah mengakomodasi pekerja asing dengan berbagai fasilitas, dimana pemerintah menyediakan perumahan pemerintah atau umum dengan jumlah banyak yang dikenal dengan *Jūtaku*. Perumahan dengan

biaya yang murah dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah (Aqyla 2021). Meskipun jumlah perumahan yang cukup banyak, tidak dapat menampung jumlah pekerja asing. Sehingga pekerja cenderung mencari tempat tinggal yang lain atau menunggu dengan mendaftar perumahan pemerintah sesuai jadwal yang akan ditentukan. Tidak hanya itu, rumah sakit sebagai infrastruktur sosial menjadi penting untuk menunjang kehidupan dalam memberikan pelayanan bagi pekerja asing di Jepang. Sistem kesehatan yang berkualitas, tentunya membutuhkan perawat yang terlatih. Sehingga mendorong Jepang membatasi masuknya pekerja asing yang memiliki keterampilan khusus. Dahulu pekerja asing yang kesulitan menemukan informasi terkait rumah sakit yang menggunakan bahasa ibu mereka. Akan tetapi pemerintah kini telah memfasilitasi ahli bahasa (interpreter) yang dapat memudahkan pekerja asing untuk mengakses kesehatan. Menurut The Japan Times, hasil dari wawancara dengan salah satu perusahaan mengatakan bahwa mereka kurang yakin dapat memadai fasilitas untuk menunjang kehidupan pekerja asing di Jepang (Koizumi, Nagata, and Sugiyama 2019). Hal ini juga dapat dipengaruhi semakin banyak pekerja asing, maka semakin sulit mengontrol pekerja asing. Akan tetapi berbagai upaya pemerintah dalam memberikan fasilitas yang dapat memadai infrastruktur masyarakat domestik maupun internasional, hal ini dikarenakan sebagai bentuk kebutuhan Jepang akan urgensi sumber daya manusia. Sehingga pemerintah Jepang mereformasi kebijakan pekerja asing yang dipengaruhi oleh *non-human environment* yang merupakan bagian dari faktor internal menjadi faktor yang paling mendominasi dalam proses pembuatan kebijakan di Jepang.

**Tabel 2. Jumlah Persentase Penggunaan Robot di Jepang per 1000  
Unit 2015-2020**



Sumber: (Statista, 2022)

## 2.2. Society

Berdasarkan faktor internal teori Richard Snyder, faktor internal menjadi faktor pendorong proses pengambilan keputusan (*Decision Making Process*) terkait suatu kebijakan. Society sebagai bagian dari faktor internal yang merupakan opini & sikap masyarakat Jepang dalam merespons keberadaan dan kebijakan terkait tenaga kerja asing (Snyder, Bruck, and Sapin 2002). Respons masyarakat menjadikan pemerintah Jepang mempertimbangkan kepentingan negara yang berawal dari kekhawatiran masyarakat atas keberadaan pekerja asing yang dianggap dapat terjadinya kejahatan. Sehingga pemerintah Jepang memprioritaskan



suara masyarakat untuk mempertahankan kepercayaan sosial dan identitas nasional dapat menjadi aspek dalam proses pembuatan kebijakan suatu negara.

Sejumlah masalah yang tengah dihadapi dari krisis demografis yang mempengaruhi krisis ketenagakerjaan, menjadikan Jepang memilih terbuka terhadap tenaga asing dengan memberikan batasan bagi pekerja asing melalui kebijakan yang didorong dengan beberapa faktor Internal, yakni kondisi sosial masyarakat Jepang. Pada dasarnya Jepang merupakan identitas yang homogen, hal ini mempengaruhi masyarakat Jepang yang cenderung menolak keberadaan tenaga kerja asing. Masyarakat Jepang didominasi oleh etnis Yamato. Masyarakat Jepang terbiasa hidup berkelompok dengan adanya persamaan identitas, yang mana kelompok yang homogen cenderung tidak terbiasa dengan keberadaan orang asing atau orang yang berbeda dari kelompoknya. Terutama Jepang yang telah menutup diri sejak lama dari pengaruh asing. Keberadaan tenaga kerja asing dikhawatirkan dapat mengancam, yang mana adanya perbedaan budaya tersebut dikhawatirkan dapat menggeser budaya dan sosial masyarakat Jepang (Sieg & Miyazaki, 2016).

Selain itu rancangan yang mengatur keimigrasian terkait kebijakan pekerja asing di Jepang yang memiliki keterampilan khusus dengan berbagai keuntungan yang didapatkan seperti jaminan pekerjaan, visa baru dan lainnya. Tetapi hal tersebut menjadi pemicu kekhawatiran masyarakat, bahwa upah yang didapatkan akan berbeda dengan masyarakat domestik. Sehingga menimbulkan berbagai penolakan untuk menerima keberadaan tenaga kerja asing.

Sistem demokrasi proses politik yang berjalan di Jepang mengacu pada kebebasan pers, hak sipil, menghormati hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat. Proses politik yang berjalan yang mana masyarakat Jepang yang berusia 20 bahkan

lebih dapat memiliki hak pilihnya. Melalui demokrasi pemerintah menghormati kebebasan sipil dan hak politik masyarakatnya. Masyarakat sebagai aktor non negara menjadi alat yang penting dalam proses pembuatan kebijakan. Sejak lama untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat Jepang terkait terbentuknya kebijakan, pemerintah Jepang melakukan pemungutan suara secara teratur yang kemudian akan dipublikasikan. Sehingga upaya alternatif pemerintah Jepang untuk menanggapi penerimaan pekerja asing dengan melakukan koalisi bersama masyarakat lokal di Jepang. Dengan meningkatnya tenaga kerja asing di Jepang pada era Shinzo Abe, menimbulkan respons oleh masyarakat yang mana upaya pemerintah Jepang tersebut menimbulkan pro dan kontra oleh masyarakat (Tomoko 2018). Sehingga dalam proses terbentuknya kebijakan tersebut, pemerintah memperoleh pemungutan suara dalam menerima pekerja asing sebesar 54 yang mendukung rancangan kebijakan sedangkan masyarakat yang menolak keberadaan pekerja asing sebesar 34% (Stock and Devlin 2018). Oleh sebab faktor internal tersebut, yang mana terdapat asumsi masyarakat yang khawatir terhadap pekerja asing yang keberadaannya diutamakan. Tidak hanya itu masyarakat kerap kali mendengar berita bahwa imigran cenderung membuat masalah di negara Eropa seperti Prancis, Berlin dan Jerman (Ryall 2016).

Berbagai bentuk penolakan masyarakat terhadap tenaga kerja asing demi mempertahankan budaya Jepang. Tindakan penolakan masyarakat terhadap penerimaan masyarakat asing tersebut sama dengan istilah nativisme yaitu sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap kebijakan migrasi yang bertolak belakang dengan kebutuhan negara saat ini, yang mana cenderung melihat bahwa masyarakat asing tidak dapat berbaur dengan satu sama lainnya. Meskipun pada umumnya

dengan menerima tenaga kerja asing lebih banyak dapat meningkatkan hubungan asimilasi masyarakat di lingkungan sosial dan keragaman budaya di Jepang, tetapi kenyataannya cukup sulit untuk mewujudkan hal itu terjadi.

Tidak hanya itu, kebijakan pembatasan tenaga kerja asing juga demi terhindarnya Jepang dari status imigran yang ilegal sebagai mata-mata atau teroris (Kusuma Pratiwi 2014). Pemerintah Jepang berupaya untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi tenaga kerja asing yang diatur dalam kebijakan keimigrasian berdasarkan status kependudukan. Jepang sebagai negara maju terutama anak-anak mudanya cenderung tidak menginginkan pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga, salah satunya yaitu dalam bidang pertanian. Sementara pertanian menjadi faktor yang penting dalam perekonomian negara, sehingga pemerintah Abe mendorong sektor pertanian yang cenderung didominasi oleh tenaga kerja asing yang ilegal untuk meningkatkan perekonomian.

Sebagai negara industri, wajar bagi Jepang dalam memperketat kualifikasi tenaga kerjanya. Hal ini tentunya mempengaruhi lingkungan sosialnya terhadap masyarakat dalam membatasi tenaga kerja asing. Secara historis, keterbukaan Jepang terhadap masuknya tenaga kerja asing sudah sejak lama. Sejak keterbukaan Jepang yang meningkatkan jumlah tenaga kerja asing, yang mana juga meningkatkan sebagian status tenaga kerja ilegal. Pada 1987, pekerja ilegal ikut meningkat sehingga pemerintah harus mendeportasi para tenaga kerja yang ilegal (*Los Angeles Times* 1989). Dengan meningkatnya tenaga kerja ilegal, tingkat kejahatan juga meningkat. Dengan meningkatnya kejahatan di Jepang, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dalam Jepang membatasi masuknya pekerja asing di Jepang.

Standarisasi tenaga kerja asing diatur dalam hukum sejak 1947 dengan menerapkan hukum bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing berstatus ilegal. Bahkan diatur dalam hukum tindak pidana bagi majikan yang mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal yang dikenal sebagai *Promoting the Illegal*. Keberadaan tenaga kerja asing ilegal dapat mengancam keamanan nasional, salah satunya terdapat catatan kriminal pada sebagian imigran yang berstatus ilegal. Tenaga kerja ilegal tidak hanya merugikan sektor pemerintahan, tetapi juga sektor industri pada salah satu toko serba ada yaitu Seven Eleven. Hal ini dikarenakan sevel maupun toko lainnya sebagai perusahaan retail akan dianggap gagal dan tidak bertanggung jawab dalam mempekerjakan tenaga kerja asing yang ilegal (The Jakarta Post, 2019).

Pemerintah Jepang menindak lanjuti keberadaan tenaga kerja ilegal untuk dipulangkan dan mereka menyetujui keputusan tersebut. Pada 2020, sejumlah tenaga kerja ilegal yang akan dipulangkan ditolak negara asalnya dan tenaga kerja ilegal pun menolak untuk dipulangkan ke negara asalnya sebesar 3.100 orang (Hattori, 2021). Meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh tenaga kerja ilegal telah merugikan bagi masyarakat. Pelaku kejahatan dicurigai melakukan pemerkosaan dan adanya pelanggaran hukum seperti tindak narkoba. Sejumlah tindakan kejahatan menjadi kekhawatiran masyarakat memperkuat sikap masyarakat terhadap *xenophobia*. Sikap yang cenderung tidak dapat menerima kelompok yang berbeda, sehingga sikap masyarakat dapat memperlakukan pekerja asing dengan tindak diskriminasi dan kekerasan non-verbal. Salah satu penduduk Korea yang bekerja di Jepang sulit untuk mencari tempat tinggal dikarenakan kewarganegaraanya (Funakoshi 2017). Sikap *xenophobia* masyarakat sebagai salah

satu faktor pemerintahan Jepang memperketat masuknya tenaga kerja asing melalui hukum untuk menghindari perpecahan sosial.

Selama kedudukan Abe, kebijakan tersebut mempengaruhi dinamika politik Jepang yang mana terdapat kepentingan nasional terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan domestik. Masyarakat sosial yang menjadi faktor pendorong dalam pengambilan keputusan kebijakan internasional. Upaya yang dilakukan Jepang hanya untuk jangka pendek yang mana kedepannya akan menghambat perekonomian nasional bagi generasi muda sehingga menjadi tantangan bagi Jepang untuk mencari solusi jangka panjang demi mengatasi krisis populasi yang menyusut dan menua menjadi yang tengah dihadapi. Berbagai bentuk upaya dilakukan Jepang untuk mengatasi krisis pekerja, yang mana kondisi domestik Jepang mempengaruhi dinamika politik.

Tidak sedikit yang menganggap bahwa upaya Jepang untuk mengatasi krisis demografis dengan menerima tenaga kerja asing tersebut dianggap buru-buru. Pada dasarnya keputusan pemerintah Jepang dalam proses pembuatan kebijakan ditentukan secara sosial. Salah satunya dengan menanggapi opini masyarakat, organisasi dan partai politik. Hal tersebut demi menjaga keamanan, termasuk ketertiban umum, melindungi mekanisme kesejahteraan, stabilitas budaya, atau kepercayaan sosial. Tindakan tersebut juga akibat adanya kekhawatiran pemerintah Jepang terhadap minimnya peluang pekerjaan dan tingkat kejahatan jika menerima lebih banyak tenaga kerja asing

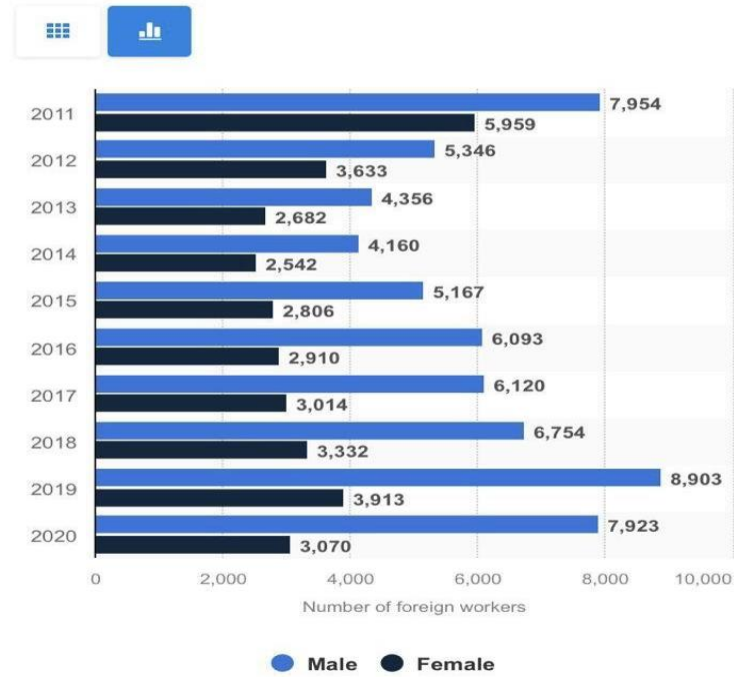
Sebelum menerima lebih banyak tenaga kerja asing, Jepang sudah semestinya memperbaiki kondisi domestiknya yaitu minimnya populasi. Jepang mencoba berbagai upaya untuk mengatasi krisis demografis dan memberikan

kesempatan lebih banyak lagi bagi tenaga kerja perempuan yang sudah menjadi langkah awal pemerintahan Abe. Akan tetap sejumlah upaya tersebut hanya membawa sedikit perubahan, sehingga Jepang harus mencari tenaga kerja asing dengan selektif (Kato, n.d.). Meskipun pada awalnya pemerintah Jepang cenderung memprioritaskan suara masyarakat yang dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan pekerja asing sebelumnya. Akan tetapi urgensi atas kondisi Jepang terhadap kekurangan SDM, mendorong pemerintah Jepang perlahan berubah dan melakukan reformasi kebijakan pekerja asing.



**Gambar 3. Jumlah Tenaga Kerja Ilegal di Jepang**

**Number of detected illegal foreign workers in Japan from 2011 to 2020, by gender**



Sumber: (Statista, 2022)

## 2.3. Human Environment

### 2.3.1 Cultural

Budaya nasionalisme yang telah dibangun sejak lama, sehingga masyarakat Jepang sudah tertanam lama rasa semangat nasionalisme. Dapat dilihat dari masyarakat yang mulai berpindah pada sektor industri dan meninggalkan pertanian untuk ikut terlibat dalam memajukan industri. Meskipun seiring perkembangan waktu, Jepang tetap mengikuti arus modernisasi yang tidak menghambat Jepang untuk tetap mempertahankan warisan tradisi dan budaya yang berharga.

Salah satunya sebagian masyarakat Jepang tidak menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan perbedaan bahasa juga menyulitkan masyarakat untuk berkomunikasi dan memahami satu sama lainnya yang menjadi hambatan saat berbaur dengan masyarakat asing, sehingga pemerintah Jepang memberlakukan kebijakan pembatasan pekerja asing yang memiliki keterampilan khusus yaitu dapat berbahasa Jepang. Pada masa pemerintahan Abe, hambatan komunikasi tersebut menjadikan pemerintah berupaya memberikan bantuan multibahasa yang terus berkembang untuk menerima lebih banyak pekerja asing dan memudahkan dalam berkomunikasi antar masyarakat domestik. Selain itu, budaya Jepang hingga saat ini erat dengan nilai leluhurnya, demi mempertahankan dan melestarikan kebudayaannya.

Maju nya perekonomian Jepang hasil yang diawali oleh budaya pekerja keras ini. Sehingga untuk mempertahankan perekonomian negara adanya tekanan bagi pekerja untuk bekerja keras, yang mana perusahaan yang meminta waktu dan energi pekerja sebagai bentuk loyalitas pada perusahaan. Sedangkan perusahaan memiliki jam kerja yang panjang dan tetap efisien. *Kaizen* sebagai bentuk strategi untuk mengevaluasi pekerjaan pada jam kerja berlangsung, sehingga lebih efisien dan menghemat waktu dalam lingkungan kerja yang sangat cepat. (Morishita, 2021). Bahkan ditemukan sebesar 63% bahwa pekerja merasa bersalah ketika mengambil cuti. Faktanya produktivitas di Jepang masih dinilai rendah, meskipun memiliki waktu jam kerja yang panjang (Lin 2022). Rendahnya produktivitas perusahaan di Jepang dipengaruhi oleh budaya kerja keras masyarakat Jepang, sehingga mempengaruhi kurangnya minat anak muda terlibat dalam perusahaan. Budaya yang sudah lama tertanam, sehingga upaya pemerintah untuk



meningkatkan budaya pekerja dengan merevisi kebijakan ketenagakerjaan tidak banyak berubah. Tidak hanya itu, adanya sistem hierarki dalam perusahaan yang menjadi penting.

Bahkan bagi pekerja asing di Jepang kaget dan tidak dapat memahami dengan budaya tersebut. Budaya tersebut menjadi tantangan bagi pekerja asing untuk memahami praktik kerja masyarakat Jepang dengan mengetahui dasar budaya kerja masyarakat Jepang. Adanya perbedaan budaya tersebut, mendorong pekerja asing untuk menyesuaikan diri dengan budaya Jepang. Hal tersebut untuk berasimilasi atau mengikuti perilaku yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat Jepang baik di tempat kerja maupun saat melakukan interaksi bersama karyawan. Sedangkan menjadi tantangan bagi masyarakat lokal untuk menerima sifat keberagaman pekerja asing.

Tidak hanya itu, budaya homogen masyarakat Jepang sangat melekat pada identitas masyarakat Jepang, sehingga mempengaruhi gaya kerja yang kolektif yang mementingkan kepentingan bersama. Selain itu budaya hierarki dalam sistem kerja perusahaan di Jepang yang menuntut loyalitas yang mana memprioritaskan perusahaan yang mana menjadi bagian dari budaya kolektivis. Bahkan perusahaan mencari pekerja yang dapat menyesuaikan dengan budaya yang diterapkan di perusahaan Jepang. Budaya yang saling terkait dan tidak jauh berbeda antara budaya di Asia Timur, dari segi wajah maupun bahasa yang tidak jauh berbeda juga memudahkan pekerja untuk belajar bahasa Jepang. Sementara masyarakat Jepang mengharapkan pekerja yang berasal dari bagian Asia Timur dapat berperilaku yang sama dengan masyarakat lokal, yang mana pekerja asing dianggap memiliki standar yang tinggi dan sederajat dengan masyarakat Jepang (Ho 2016). Terlepas dari

uniknya budaya yang dimiliki Jepang, tetapi tidak semua pekerja asing dapat bertahan maupun menyukai budaya kerja keras di Jepang.

Selain itu budaya konservatif juga mempengaruhi proses dalam pengambilan keputusan. Salah satu faktor keberadaan perempuan yang tidak dapat bekerja. Bahkan perempuan diberikan dua pilihan yaitu menjadi ibu rumah tangga atau mendapatkan upah yang sedikit saat bekerja. Keluarnya perempuan dari sektor ketenagakerjaan menyebabkan semakin berkurangnya tenaga kerja di Jepang. Sehingga pemerintah Jepang membutuhkan tenaga kerja asing untuk menutupi kekosongan ketenagakerjaan di Jepang.

Lingkungan budaya yang baru dan berbeda menjadi tantangan bagi pekerja asing yang tidak hanya menyesuaikan dengan perbedaan bahasa, tetapi juga dengan budaya kerja yang berkaitan dengan nasionalisme masyarakat Jepang. Sehingga menjadi sulit bagi pekerja asing untuk berasimilasi. Sementara terlepas dari manfaat yang dirasakan melalui keberagaman budaya, akan sulit bagi kedua entitas yang berbeda dalam menyesuaikan dari perbedaan budaya. Tidak hanya itu, keberadaan tenaga kerja asing dikhawatirkan dapat mengancam yang mana adanya perbedaan budaya tersebut dikhawatirkan dapat menggeser budaya Jepang (Sieg & Miyazaki, 2016). Perbedaan budaya antara masyarakat Jepang dan pekerja sendiri menjadi pembatas di antara keberagaman budaya tersebut, sehingga menjadi salah satu faktor pendorong pemerintah Jepang untuk membatasi masuknya pekerja asing di Jepang.

### *2.3.2. Population*

Menurunnya angka populasi Jepang setiap tahunnya menjadi masalah, sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah Jepang untuk mengatasi isu tersebut

dengan menerima pekerja asing. Sejak keterbukaan Jepang terhadap pekerja asing sampai dengan beberapa tahun terakhir jumlah populasi pekerja asing di Jepang meningkat. Pada 2012, jumlah populasi perempuan sebesar 64,480,007,00 dan laki-laki sebesar 62, 148, 992,00. Sedangkan populasi pekerja asing di Jepang kurang lebih sebesar 300.000. Meskipun jumlah pekerja asing di Jepang hanya dari 2.5% lebih sedikit dari sekian persen dari populasi Jepang. Angka tersebut masih jauh dari jumlah untuk menutupi kekosongan ketenagakerjaan. Sementara jumlah populasi masyarakat Jepang yang tidak stabil dan mengalami penurunan populasi. Meskipun begitu, pemerintah Jepang tetap menerima pekerja asing dengan selektif yang mana membatasi jumlah pekerja asing yang berlebihan di Jepang. Jumlah pekerja asing yang sedikit dibandingkan dengan populasi Jepang, hal tersebut menjadi faktor bahwa pemerintah tetap mempertahankan dalam membatasi masuknya pekerja asing di Jepang.

**Gambar 4. Jumlah Populasi Perempuan di Jepang 2012-2020**

<b>Date</b>	<b>Value</b>	<b>Change</b>
2020	64,885,441,00	-0.28%
2019	65,065,286,00	-0.12%
2018	65,140,618,00	-0.10%
2017	65,206,949,00	-0.06%
2016	65,245,704,00	-0.03%
2015	65,267,090.00	-0.09%
2014	65,324,683,00	-0.11%

2013	65,398,896,00	-0.12%
2012	65,480,007,00	-0.14%

**Sumber: (Knoema, 2022)**

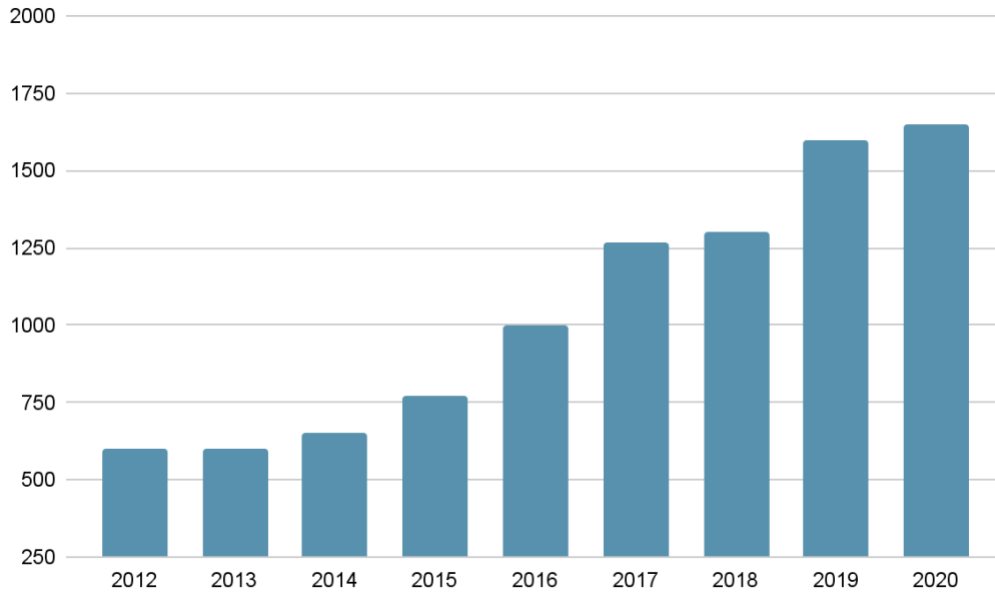
**Tabel 5. Jumlah Populasi Laki-laki di Jepang 2012-2020**

Date	Value	Change, %
2020	61,375,600,00	-0.31%
2019	61,567,714,00	-0.17%
2018	61,670,382,00	-0.15%
2017	61,765,051,00	0/11%
2016	61,830,910,00	-0.07%
2015	61,873,910,00	-0.12%
2014	61,951,317,00	-0.15%
2013	62,046,104,00	-0.17%
2012	62,148,992,00	-0.18%

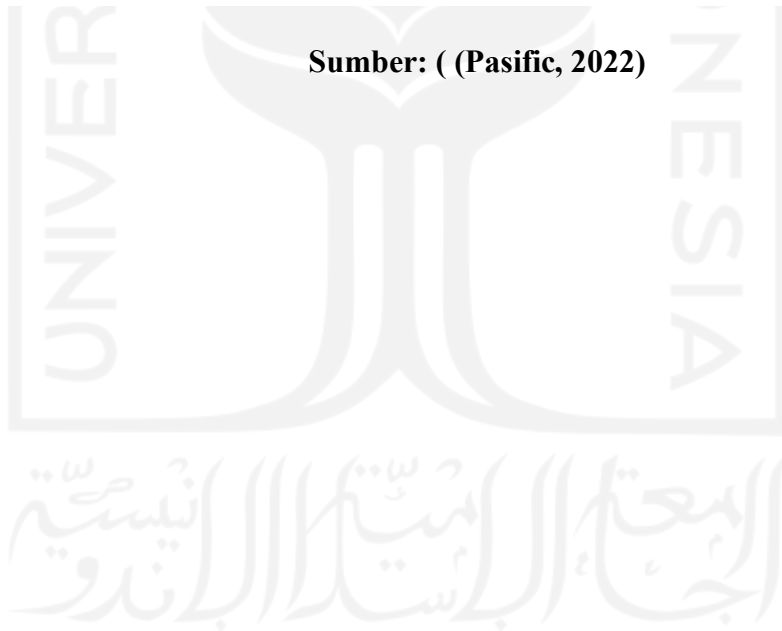
**Sumber: (Knoema, 2022)**



**Tabel 6. Jumlah Populasi Pekerja Asing di Jepang 2012-2020**



Sumber: (Pasific, 2022)



## **BAB 3**

### ***SOCIAL STRUCTURE AND BEHAVIOR***

Memasuki Bab 3, penelitian ini akan membahas struktur sosial dan perilaku yang tertanam sejak lama pada masyarakat Jepang yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah Jepang dalam membentuk kebijakan yang membatasi masuknya pekerja asing. Terdapat tiga pembahasan yang akan dibahas dalam bab ini. Subbab pertama, akan membahas nilai yang berorientasi bagi masyarakat pada umumnya yang mendorong kebijakan pembatasan pekerja asing di Jepang.

#### ***3.1. Major Common Value Orientation***

Nilai konfusius sebagai orientasi penduduk Jepang yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat Jepang. Budaya patriarki yang tertanam dalam nilai konfusius yang masih melekat dalam masyarakat. Keluarga menjadi nilai penting bagi masyarakat Jepang. Meskipun begitu peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga sangat rendah dalam mengurus anak. Sedangkan stigma perempuan lebih banyak mengurus pekerjaan rumah tangga dan anak (Sari 2020). Budaya konservatif memperkuat tindakan tersebut, yang mana adanya perbedaan antara peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga.

Tidak hanya itu, di bidang politik didominasi oleh peran laki-laki, yang mana sejak dahulu keberadaan perempuan sangat minim. Kesenjangan yang dialami perempuan, yang mana perempuan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang rendah. Sementara jika perempuan keluar dari pekerjaan untuk melahirkan dan ketika memutuskan untuk masuk kembali pada pekerjaan maka perempuan

mendapatkan upah yang sedikit. Sehingga mayoritas perempuan memilih untuk menjaga anak-anak dan mengorbankan pekerjaannya (Crawford 2021).

Generasi muda ingin menghilangkan stigma terkait kesenjangan yang dialami perempuan. Dengan adanya pandangan masyarakat Jepang terkait pernikahan, survey menunjukkan bahwa opini terhadap pernikahan dianggap tidak perlu. Survey tersebut dipengaruhi dengan tidak mudahnya dalam mengurus dan biaya untuk anak. Tindakan tersebut mempengaruhi rendahnya angka kelahiran, sedangkan keberadaan perempuan yang mengharuskan sebagai ibu rumah tangga menyebabkan Jepang kekurangan ketenagakerjaan.

Sehingga kebijakan Womenomic, sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengatasi krisis demografis dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk dapat bekerja di kantor. Akan tetapi kebijakan tersebut dianggap gagal dan tidak setara bagi perempuan (Crawford 2021). Ketidaksetaraan yang dihadapi perempuan tidak lepas dari budaya konservatif yang cenderung membatasi kebebasan perempuan, yang mana perempuan tidak dapat aktif di ranah publik. Budaya yang cenderung tidak dapat beradaptasi dengan budaya baru sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah Jepang dalam proses pengambilan keputusan.

### **3.2 Major Institutional Patterns**

Pada dasarnya pola kelembagaan utama dalam sistem sosial dan politik yang berfokus pada nilai demokrasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem pemerintah Jepang menetapkan 3 badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dengan menggunakan sistem bikameral yang mana Diet Jepang terdiri dari 2 perwakilan diantaranya House of Representative yaitu dewan perwakilan rakyat dan House of Counselor sebagai majelis tertinggi (Neely 2016). Kemudian sistem

multi-partai menjadi dasar pemerintah Jepang, meskipun didominasi oleh satu partai. Liberal Democratic Party (LDP) sebagai partai yang mendominasi di Jepang. Pengaruh yang dimiliki LDP sangat besar terutama dalam pemilihan umum terhadap majelis rendah, yang mana LDP meraih kursi terbanyak sekitar 200 dari 400 kursi pada tahun 2012. Sehingga peran LDP dapat meyakinkan pihak lain untuk mendapatkan dukungan dalam perumusan UU. Bahkan LDP dianggap sebagai partai konservatif yang kreatif, yang mana partai cenderung menyesuaikan opini publik dan tidak hanya fokus pada nilai konservatif (Krauss and Pekkanen 2011).

Dengan sistem pemerintah parlementer yang mana rakyat memilih partai politik yang diinginkan untuk memilih langsung Perdana Menteri. Diet sebagai kabinter tertinggi yang memegang kekuasaan yang memiliki kepentingan politik. Meskipun begitu, melalui struktur sosial pemerintah Jepang yang menganut sistem demokrasi dapat memenuhi kebutuhan warga negaranya melalui perilaku yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Pemerintah yang bersifat fungsional yang memiliki tanggung jawab, sehingga melalui sistem demokrasi memprioritaskan kehendak masyarakat dengan melakukan koalisi. Kemudian masyarakat dapat terlibat dalam proses pembuatan keputusan negara.

Struktur kelembagaan yang dipengaruhi oleh nilai konfusius. Hierarki sosial dari sistem konfusius dapat mewujudkan keharmonisan dan kesetiaan masyarakat kepada negara. Nilai dan prinsip konfusius sebagai proses dalam menetapkan karakter kelembagaan. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa budaya kerja keras di Jepang berdasarkan nilai konfusius yaitu tanggung jawab dan kesetiaan pada lembaga atau organisasi (Ulasan 2022). Tidak hanya itu, pemerintah berfokus pada kelembagaan negara yaitu menghormati hak asasi manusia dengan



mempertahankan keamanan manusia. Hal ini menjadi landasan bagi pemerintah Jepang yang membatasi masuknya pekerja asing dengan jumlah yang sedikit dianggap dapat mengancam keamanan nasional masyarakat Jepang.

### **3.3. Major Characteristic of Social Organization**

Karakteristik utama dari organisasi sosial berdasarkan nilai konfusius yang menerapkan kesetiaan atau loyalitas kepada atasan dan menghormati orang yang lebih tua. Selain itu bentuk organisasi sosial yaitu *Vertically structure* dan *Group oriented society*. *Vertically structure*, yang mana proses pengambilan keputusan dari atas yaitu pemimpin dan ke bawah (*top to down*). Sedangkan *Group oriented society* atau dikenal dengan memprioritaskan kepentingan bersama. Karakteristik tersebut berkaitan dengan budaya masyarakat Jepang yang kolektif. Salah satu bentuk pemerintah yang berorientasi dengan masyarakat dengan melakukan koalisi dengan masyarakat (Curtis 2004). Hal ini juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat Jepang yang homogen, sehingga pemerintah cenderung berorientasi pada kelompok.

Berdasarkan karakter organisasi sosial, lembaga pemerintah memiliki kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan. Tidak hanya itu organisasi sosial kemasyarakatan Jepang memberikan bantuan kepada masyarakat. Salah satu organisasi kemasyarakatan Jepang yaitu *Japan International Cooperation Agency* (JICA) yang bertujuan untuk mendukung pembangunan sosial ekonomi. Tidak hanya membantu masyarakat Jepang, JICA bahkan mendukung keberadaan pekerja asing dengan memberikan bantuan (JICA, 2020).

Selain itu isu pekerja asing menimbulkan perdebatan dengan adanya perbedaan pendapat dari perusahaan terhadap pekerja asing. Nippon-Keidanren

sebagai kelompok perwakilan perusahaan Jepang, mengungkapkan pandangan positif mereka terhadap penerimaan pekerja asing, yang mana dengan menerima pekerja asing dapat memperkuat nilai kreatif pada setiap warga negara. Bahkan mengusulkan Badan untuk Penduduk Asing di Jepang (Yamada 2010). Seringkali perusahaan swasta di Jepang pro dan memiliki pandangan yang positif terhadap keberadaan pekerja asing, yang mana perusahaan industri yang kekurangan ketenagakerjaan membutuhkan pekerja asing di perusahaan mereka.

### **3.4 Role Differentiations and Specialization**

Pada proses politik diferensiasi dan spesialisasi dalam pembangunan politik dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan berperan dalam melakukan pekerjaan yang baik maupun berkualitas. Sehingga dalam pembangunan politik melalui peran diferensiasi dan spesialisasi yang dapat meningkatkan perekonomian negara melalui produktivitas terkait sumber daya yang dimiliki, yang mana pembangunan politik ini menjadi penting dalam memajukan negara (Kadir 2014). Kemajuan Jepang di bidang industri membawa banyak perubahan bagi negaranya terutama elektronik. Elektronik menjadi salah satu peran yang spesial bagi Jepang terutama dalam proses pembuatan robot yang memiliki kualitas yang tinggi. Tidak hanya itu, masyarakat Jepang memiliki ambisi untuk menerima ilmu pengetahuan demi yang terbaik kedepannya. Terlibatnya masyarakat Jepang memudahkan Jepang dalam memajukan negaranya. Kerja sama antara pemerintah dan perusahaan swasta di Jepang dalam membuat robot untuk mengisi kekosongan ketenagakerjaan, dapat membantu pelayanan publik dan industri. Terutama pandemi Covid-19 yang melanda secara global, dengan tidak adanya kontak fisik melalui penggunaan robot dapat mengurangi risiko tertular antar sesama manusia

dan tetap menunjang berjalannya kegiatan manusia. Sehingga adanya perbedaan peran masyarakat dan perusahaan dalam merespons kekosongan ketenagakerjaan atas adanya kebijakan yang membatasi masuknya pekerja asing yang bekerja sama dalam mempengaruhi untuk menghasilkan suatu proses pembuatan kebijakan negara tersebut.

### **3.5. Groups Kind and Function**

Berbagai macam kelompok dengan fungsi yang berbeda sering kali mempengaruhi kebijakan suatu negara. Kelompok atau organisasi memiliki suatu kepentingan untuk mencapai tujuan tertentu, salah satunya dengan melakukan lobi dengan pemerintah. Sering kali organisasi menjadi pelobi bisnis yang berfungsi untuk terlibat dalam politik pemerintahan dalam memfasilitasi suara masyarakat. Tidak hanya itu mereka juga memiliki peran penting, sehingga mempengaruhi dalam pembentukan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan adanya perilaku atau pandangan yang menentang sikap pemerintah melalui proses pembuatan kebijakan publik. Sehingga kelompok ini sering kali memberikan bantuan pada masyarakat lokal maupun pekerja asing.

*Japan International Corporation Agency (JICA)* sebagai lembaga pemerintah yang berperan dalam membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan kegiatan bisnis dengan meningkatkan kelembagaan dan infrastruktur legislatif terhadap Undang-undang perekonomian. Selain itu juga membantu dalam kerja sama internasional, sehingga JICA bersama perusahaan swasta JP-MIRAI memberikan dukungan kemanusiaan untuk kesejahteraan masyarakat internasional dengan melindungi hak-hak pekerja asing di Jepang pada 2020. Tindakan yang memiliki kepentingan, yang mana perusahaan Jepang

membutuhkan tenaga kerja asing untuk dapat meningkatkan produktivitas. Pada 1990 berbagai kelompok kepentingan dan beberapa kementerian berkontribusi dalam melakukan kompromi atau lobi yang menghasilkan UU Keimigrasian dan Pengakuan Pengungsi (Hollifield and Sharpe 2017). Kelompok yang berhasil melobi pemerintah dalam kepentingan bisnis terhadap perusahaan yang membutuhkan pekerja asing, dan berhasil dalam meliberalisasi dengan mendapatkan sumber daya yang lebih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

### **3.6 Relevant Social Process**

Proses sosial yang terdiri dari pembentukan opini, peran orang dewasa dalam melakukan sosialisasi, dan politik yang menjadi relevan dalam kelangsungan politik negara.

#### *3.6.1 Opinion Formation*

Pembentukan opini dipengaruhi oleh nilai yang dianut menjadi orientasi masyarakat Jepang dalam proses pembuatan keputusan. Pada era Shinzo Abe adanya reformasi kebijakan terkait pekerja asing, yang mana para pekerja dapat berbagai keuntungan yang didapatkan untuk menunjang kegiatan pekerja di Jepang. Akan tetapi berbagai keuntungan tersebut menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Jepang. Sehingga sebagian masyarakat Jepang menolak reformasi ketenagakerjaan tersebut. Melihat isu tersebut Shinzo Abe berpihak kepada kepentingan masyarakat yang cenderung menolak pekerja asing, dengan alasan pekerja asing di Jepang dinilai dapat mengancam sehingga pemerintah Jepang memilih untuk membatasi pekerja asing demi keamanan warga negara dari asing (Ryan & Kuo, 2015). Selain itu juga pemerintah khawatir dan tidak ingin membuat perpecahan antara masyarakat atas adanya perbedaan identitas nasional. Pendekatan Jepang melalui

demokrasi dapat berjalan ketika pemerintah cenderung menerima suara masyarakatnya.

### 3.6.2 *Adult Socialization*

Masyarakat yang memasuki dunia kerja memiliki istilah *shakaijin* dikenal sebagai tanda kedewasaan di Jepang. Kedewasaan sosial yang dihasilkan melalui peran sosial perusahaan yang dapat menyaring masuknya pekerja di perusahaan (Shire, 2009). Salah satunya melalui program yang memberikan pelatihan bagi pekerja asing sebelum bekerja di Jepang dikenal sebagai *Technical Intern* untuk menyaring masuknya pekerja asing di Jepang. Selain itu, para pekerja dapat menyesuaikan dengan tujuan perusahaan dan perilaku masyarakatnya. Dewasa secara sosial sebagai proses dalam memahami norma budaya masyarakat dan dapat beradaptasi terhadap keadaan baru dan belajar memenuhi harapan masyarakat domestik, sehingga proses sosialisasi menjadi penting bagi masyarakat untuk memahami dan budaya sosial masyarakat setempat seperti di tempat kerja. Seperti masyarakat Jepang yang menaruh harapan pada pekerja asing yang dapat menyesuaikan dirinya dengan budaya sosial Jepang salah satunya yaitu budaya kerja keras.

### 3.6.3 *Political*

Keterbukaan Jepang terhadap keberadaan pekerja asing menuai kontroversial, hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan Jepang yang menjamin kehidupan sosial tenaga kerja asing. Partai politik Jepang memiliki ikatan yang tinggi terkait kebangsaan dan menghargai homogenitas budaya, menjadi salah satu faktor menolak masuknya tenaga kerja asing. Kebijakan tersebut dikritisi oleh partai oposisi Jepang yaitu Partai Demokrat yang bahkan mencoba untuk mencegah

kebijakan tersebut berjalan. Tidak hanya itu, partai konservatif menolak terhadap perubahan yang cukup besar dalam menerima pekerja asing. Kebijakan tersebut dianggap tidak memberikan angka yang signifikan dalam menerima tenaga kerja asing. Sehingga dikhawatirkan dapat menuai perpecahan seperti diskriminasi yang mengganggu kesejahteraan sosial (Schwarcz 2018). Selain itu para kritikus menganggap bahwa perubahan tersebut akan membawa berbagai masalah seperti kesejahteraan sosial, diskriminasi, kurangnya integrasi antara masyarakat, meskipun kebijakan tersebut memiliki syarat tertentu dalam menerima tenaga kerja asing (Nithi, 2019). Dengan keterbukaan Jepang terhadap tenaga kerja asing juga dikhawatirkan dapat menurunkan upah bagi tenaga kerja domestik Jepang (Nithi, 2019). Selain itu, dikhawatirkan kebijakan tersebut juga dapat memberikan kesempatan bagi tenaga kerja asing untung tinggal secara permanen di Jepang (SUZUKI, 2018). Selain itu partai oposisi menolak keberadaan tenaga kerja asing, yang mana keputusan pemerintah Jepang terhadap kebijakan dianggap tergesa-gesa. Partai tersebut menyatakan bahwa Undang-undang terkait keimigrasian tidak melindungi hak tenaga kerja asing (Punch, 2018)

Meskipun keterbukaan Jepang terhadap masuknya pekerja asing yang dibatasi melalui kebijakan tetap menjadi perdebatan, yang mana keberadaan tenaga kerja asing mempengaruhi dinamika politik. Tetapi bagi partai konservatif yang menghargai terhadap keberadaan tenaga kerja asing, menjadi sulit karena harus menjaga kepercayaan sosial yaitu opini masyarakat. Kebutuhan ekonomi dan tekanan politik yang diberikan oleh partai politik terhadap kebijakan pekerja asing. Akan tetapi pemerintah Jepang sendiri sadar akan konsekuensi dan enggan membuat perubahan terhadap ketatnya pekerja asing. Kebijakan tersebut belum

pasti akan mempengaruhi dalam pemilihan politik partai demokrat liberal. Sedangkan para aktor negara khawatir akan kehilangan suara masyarakat, sehingga cenderung mendukung opini masyarakat yang memilih menolak tenaga kerja asing. Oleh karena itu, LDP berupaya dengan membentuk perjanjian ekonomi politik dengan negara Asia untuk mendatangkan pekerja asing dan program pelatihan untuk memenuhi kepentingan bisnis. Struktur sosial dan perilaku politik pemerintah di Jepang, menjadi dasar sikap masyarakat dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang membentuk perilaku politik secara psikologi yang mempengaruhi reaksi individu maupun kelompok. Sehingga tidak mendominasi dalam proses pembuatan kebijakan, dikarenakan tidak sedikit masyarakat yang menerapkan nilai-nilai tradisional yang telah berdampingan dengan nilai modern yang mana budaya tradisional perlahan berubah yang dipengaruhi oleh budaya barat.

## BAB 4

### EXTERNAL SETTING

Berdasarkan teori Richard Snyder bahwa *external setting* atau faktor dari luar yaitu aksi dan reaksi berupa kritikan dari organisasi dan negara sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dan secara tidak langsung membatasi proses pembuatan kebijakan. Meskipun melalui rumusan aksi, reaksi dan interaksi, ketika faktor dari luar memberikan reaksi terkait kebijakan maka negara tidak selalu mengambil tindakan lebih lanjut atas reaksi tersebut. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa proses dalam pembuatan kebijakan tanpa menentang dari tujuan nasional negaranya (Snyder 1954).

#### **4.1 Non-Human Environment**

Non-Human Environment atau Lingkungan Bukan Manusia, merupakan kebijakan negara yang dipengaruhi oleh kebijakan yang berasal dari suatu kondisi negara lain. Salah satu keadaan non-human dari pengaruh pekerja migran yang membutuhkan lapangan pekerjaan maupun yang bermasalah di negara lain. Salah satunya kondisi Vietnam yang sulit menemukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang tinggi, sehingga pemerintah Vietnam mendorong masyarakatnya untuk memperoleh pengetahuan melalui program pelatihan. Dengan program pelatihan Jepang menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat Vietnam. Pekerja Vietnam sebagai populasi paling tinggi kedua sebagai pekerja di Jepang sejak 1992, hal ini dipengaruhi oleh mudahnya masyarakat Vietnam yang beradaptasi dengan budaya Jepang dengan memiliki kesamaan kebiasaan, gaya



hidup dan budaya pekerja keras yang menjadi kemudahan bagi masyarakat Vietnam untuk beradaptasi dengan budaya kerja keras di Jepang. dengan mengikuti program pelatihan terlebih dahulu dapat meningkatkan keterampilan Vietnam (Uyen, Nguyen, and Kok 2019). Tidak hanya itu kondisi Filipina yang tingkat penganggurannya tergolong tinggi dan secara geografis cukup sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga banyak dari masyarakat Filipina memiliki keinginan bekerja di luar negeri (The Pinoy News 2014). Keterampilan yang tinggi bahkan masyarakatnya dikenal sebagai pekerja keras yang dimiliki oleh Filipina sangat dibutuhkan oleh Jepang, dengan gaji yang relatif tinggi bagi pekerja berketerampilan tinggi tentu menjadi peluang dan impian bagi masyarakat Filipina. Jepang dan Filipina yang saling membutuhkan satu sama lainnya bekerja sama melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Jepang-Filipina (JPEPA) dengan menjalani pelatihan terlebih dahulu, sehingga Jepang dapat menerima pekerja Filipina dengan jumlah yang banyak (Abad 2023).

Kondisi dari luar negara tersebut mempengaruhi Jepang dalam menerima pekerja asing, meskipun secara bersamaan tetap mempertahankan kebijakan pembatasan masuknya pekerja asing. Sehingga dahulu Jepang dikenal sebagai negara *non-immigrant* atau kondisi negara yang hanya menerima warga negara asing dengan waktu yang sementara. Jepang membatasi masuknya pekerja asing dengan kualifikasi yang tinggi, sedangkan bagi pekerja asing yang memiliki keterampilan yang rendah hanya dapat tinggal di Jepang dengan waktu yang terbatas. Misalnya pekerja magang (TITP) yang awalnya bertujuan untuk mendapatkan ilmu di Jepang dan kembali ke negara asalnya. Selain itu kejahatan oleh sejumlah penduduk asing menjadi ancaman keamanan non tradisional bagi

masyarakat Jepang. Tindakan pemerintah dengan membatasi masuknya pekerja asing di Jepang demi kepentingan nasional. Meskipun pada akhirnya secara perlahan Jepang melakukan reformasi kebijakan terhadap pekerja asing.

#### **4.2 Other Culture**

Pada dasarnya keberadaan imigran dapat mempengaruhi perubahan kondisi budaya suatu negara. Dengan adanya perbedaan budaya di suatu negara yang homogen, masyarakat dapat memahami dan menghormati keberagaman budaya. Akan tetapi faktanya perbedaan budaya menjadi sulit bagi masyarakat Jepang untuk beradaptasi. Budaya dari luar yang dibawa oleh pekerja asing dikhawatirkan dapat menggeser dan mengancam kebudayaan asli Jepang. Adanya perbedaan bahasa dan budaya menjadi salah satu hambatan masyarakat dalam berkomunikasi. Kekurangan dalam memahami lintas budaya yang berbeda menjadi salah satu faktor yang menyulitkan bagi masyarakat Jepang dalam menerima orang asing. Sehingga kesulitan tersebut menjadikan pemerintah Jepang berupaya melakukan multibahasa, untuk mempermudah komunikasi dan bangsa yang terintegrasi antara masyarakat dan pekerja asing di Jepang.

Selain itu Jepang masih mempertahankan budaya bisnis yang cenderung tradisional seperti berpakaian formal, berjabat tangan dan membungkuk sehingga orang asing diharapkan dapat menyesuaikan budaya tersebut. Kemudian adanya budaya kerja keras di perusahaan, tidak seimbang dengan upah yang didapatkan oleh para tenaga kerja asing di Jepang. Pada 2020, terdapat kasus bahwa pekerja asing yang dulunya mengharapkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di Jepang demi memperbaiki perekonomiannya, kini ingin pindah kembali ke negara asalnya (Denyer 2020). Budaya kerja keras tersebut menyadarkan pemerintah,

sehingga diperlukan adanya manajemen budaya atau perubahan secara seimbang. Budaya yang ekstrim ini tentu perlu adanya modernisasi, salah satunya Nomura sebagai perusahaan keuangan Jepang yang budaya kerjanya telah berubah sejak pandemi dengan budaya kerja yang lebih fleksibel dan terbebas dari kerja budaya yang tradisional (Okuda 2021). Akan tetapi budaya kerja yang fleksibel ini masih dianggap tidak sesuai dengan nilai yang telah lama mereka terapkan. Sehingga budaya kerja ini belum dapat sepenuhnya mempengaruhi budaya kerja di Jepang.

Gaya kerja yang mulai berubah mengikuti perkembangan dan standar global, salah satunya JCO sebagai perusahaan yang akan meninggalkan gaya kerja yang tradisional. Dengan menggunakan pendekatan yang lebih ke barat seperti menjadi kelompok yang lebih kecil dalam bekerja (Mach 2020). Selain itu keberadaan perusahaan dan investasi internasional di Jepang, sehingga adanya budaya kerja yang berbeda dengan budaya kerja tradisional Jepang, mendorong Jepang untuk meningkatkan budaya kerja mereka dengan meningkatkan cuti tahunan seperti memberikan lima hari libur setiap tahunnya dan pengurangan jam kerja (Dev 2022).

Selain itu budaya terhadap kesenjangan gender yang mana sering kali membatasi ruang gerak dalam kebebasan politik, sosial, budaya dan hak asasi perempuan. Sehingga muncul kesetaraan gender sebagai bentuk memperjuangkan kesetaraan hak perempuan yang merupakan bagian dari budaya barat yang pertama kali disuarakan oleh PBB. Adanya gagasan dari barat tersebut menyatakan bahwa betapa pentingnya peran dan keterlibatan perempuan di berbagai bidang dan menghapuskan tindakan diskriminasi terhadap perempuan yang diatur dalam perjanjian yaitu *The 1979 Convention on the Elimination of All Forms of*

*Discrimination against Women* (CEDAW) (Parker 2013). Akan tetapi masih banyak negara jauh tertinggal dalam menerapkan kesetaraan gender salah satunya Jepang sebagai negara maju yang berada di urutan 120 dari 156 negara, yang mana minimnya keterlibatan perempuan dalam sektor publik maupun bekerja di perusahaan yang dipengaruhi oleh budaya patriarki. Meskipun Jepang telah lama menandatangani konvensi perempuan CEDAW yang semestinya membutuhkan kesadaran terhadap budaya gender, akan tetapi budaya konfusius mendominasi dalam mempengaruhi kesenjangan gender di Jepang. Kesadaran akan kesetaraan gender mendorong pemerintah Jepang dalam memperjuangkan perubahan budaya melalui *Womenomic* sebagai salah satu upaya pemerintahan Abe dalam meningkatkan kesetaraan gender di tempat kerja, yang mana kebijakan ini melibatkan perempuan untuk dapat bekerja sebagai pekerja tetap dan secara perlahan menuju perempuan yang setara. Pada saat kebijakan *Womenomic* belum diterapkan hanya terdapat 1 juta populasi perempuan yang bekerja, sedangkan setelah diterapkannya *Womenomic* keterlibatan meningkat menjadi 2 juta populasi (Subekti, Anggraini, and Daniah 2021). Sehingga budaya kesetaraan gender mempengaruhi budaya Jepang dalam menerima perempuan untuk terlibat dalam pekerjaan di Jepang secara perlahan.

#### **4.3 Other Societies**

Berdasarkan teori dari Richard Snyder, faktor dari luar yang merupakan kritikan dari negara lain dapat mempengaruhi proses pembentukan kebijakan suatu negara. Other societies atau masyarakat dari luar mempengaruhi kebijakan suatu negara. Adanya kritikan oleh sejumlah negara terhadap keputusan pemerintah

Jepang dalam proses terbentuknya kebijakan pembatasan pekerja asing terhadap ketatnya hukum ketenagakerjaan dan birokrasi Jepang.

Pada dasarnya lingkungan sosial sebagai alat penggerak kehidupan di suatu negara, salah satunya pekerja asing sebagai alat penggerak kehidupan perekonomian di Jepang. Akan tetapi ketatnya kebijakan terkait masuknya pekerja asing di Jepang kontradiksi dengan kebutuhan Jepang terkait ketenagakerjaan, sedangkan di sisi lainnya tentu menyulitkan bagi pekerja asing. Tidak hanya sulit masuknya pekerja asing di Jepang, kondisi pekerja asing dengan status TTIP sering kali mengalami pelanggaran HAM di Jepang juga menimbulkan keprihatinan yang terpaksa bekerja di luar tanggung jawab dari pekerjaannya. Kesenjangan antara kebutuhan Jepang terhadap pekerja asing dan kondisi sosial yang dihadapi pekerja asing di Jepang menjadi faktor eksternal, yang mana TTIP menimbulkan kritikan dari luar negeri yaitu Amerika Serikat, yang mana program tersebut memiliki indikasi perdagangan pekerja asing dengan dalih bahwa pekerja tersebut dalam masa pelatihan, akan tetapi jam kerja yang berlebihan. Selain itu Human Right Watch memberikan kritikan, yang mana kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh pekerja asing di Jepang membutuhkan perhatian (Human Right Watch, 2019). Pada 2019, bahkan pekerja asing yang memiliki keterampilan khusus mendapatkan upah yang rendah (LANG, 2022). Sehingga Jepang didesak untuk memberikan bantuan bagi pekerja asing yang menjadi korban kekerasan dan bergaji rendah.

Diskriminasi yang dihadapi masyarakat Jepang menimbulkan kritikan dari masyarakat luar negeri. Akan tetapi Jepang belum memiliki aturan yang dapat melindungi kesejahteraan sosial bagi pekerja asing di Jepang. Kebijakan keimigrasian sebelumnya yang dianggap dapat memecah belah perbedaan sosial,

memperkuat aktor negara dalam membuat keputusan dengan mereformasi kebijakan. Tidak hanya itu, dengan keberadaan pekerja asing yang bersifat sementara dapat menimbulkan kesenjangan sosial dikarenakan tidak menetapnya pekerja asing di Jepang. Negara-negara barat yang menerapkan sistem demokratis, menganggap bahwa kebijakan pekerja asing yang ketat di Jepang dianggap sebagai kasus yang membawa pengaruh negatif (Bartram, 2000; Komine, 2018). Menurut kritikus, perubahan kebijakan pekerja asing tersebut dapat membawa perpecahan yang mana adanya diskriminasi dan kurangnya integrasi (Kaveevivitchai, 2019). Hal ini melihat catatan hak asasi manusia terkait pekerja asing di Jepang yang dikritik internasional akan semakin meningkat.

Kritikan tersebut juga dapat mempengaruhi aktor negara dalam mempertimbangkan kembali keputusan terhadap kebijakan negara. Meskipun kebijakan keimigrasian tersebut tidak mempengaruhi dalam proses pembuatan kebijakan pembatasan pekerja asing di Jepang dan sah saja bagi pemerintah Jepang dalam memutuskan kebijakan luar negerinya.

#### **4.4. Societies Organized and Functioning as States Government Action**

*Societies Organized and Functioning as States Government Action* yang berfungsi sebagai aksi tindakan pemerintah negara dalam menghadapi kondisi sosial yang beredar di luar negaranya, yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh negaranya atau negara lainnya. Kebijakan pembatasan pekerja asing tentu dengan maksud dan tujuan kepentingan nasional Jepang. Akan tetapi kebijakan tidak hanya membatasi pergerakan pekerja asing di Jepang, tetapi juga terdapat berbagai masalah pada program yang membatasi tersebut. Tindakan

Jepang dalam membatasi masuknya pekerja asing menimbulkan faktor dari luar (*setting external*) yang mana adanya sejumlah respons terkait isu sosial dan ketatnya kebijakan pekerja asing, meskipun pada awalnya informasi yang diperoleh tersebut tidak mempengaruhi Jepang dalam mempertahankan kebijakan tersebut dengan mengeluarkan berbagai langkah. Tindakan Jepang dalam merespons adanya sejumlah kritikan sebagai bentuk *setting external*, yang mana pemerintah Jepang melakukan revisi pada kebijakan pekerja asingnya. Salah satu tindakan Jepang dalam merespons pelanggaran yang sering kali dihadapi pekerja asing untuk melindungi hak asasi pekerja melalui pelayanan konseling yang dilaksanakan oleh JP-MIRAI sebagai badan yang dibentuk bersama JICA dan pemerintah daerah (Casanova 2022). Layanan yang dapat melaporkan keluhan dan kesulitan yang dialami pekerja secara anonim, bahkan jika masalah serius dapat ditindaklanjuti kepada ranah hukum.

Adanya sejumlah kritikan terkait isu sosial dan ketatnya kebijakan pekerja asing, informasi yang diperoleh tidak mempengaruhi Jepang dalam mempertahankan kebijakan tersebut dengan mengeluarkan berbagai langkah baru untuk menerima pekerja asing salah satunya dengan melakukan reformasi kebijakan pekerja asing. Tindakan Jepang dalam merespons adanya sejumlah kritikan sebagai bentuk *setting external*, yang mana pemerintah Jepang melakukan revisi pada kebijakan pekerja asingnya. Meskipun faktor eksternal merupakan salah satu faktor utama dalam mendorong proses pembuatan kebijakan, akan tetapi faktor eksternal disini tidak begitu mendominasi dalam proses pembuatan kebijakan di Jepang

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah Jepang terhadap kebijakan pekerja asing sebagai bentuk kepentingan nasional negaranya yang berkaitan dengan teori *decision making process* Richard Snyder. Menurut Richard Snyder berdasarkan konsep *decision making process* terdapat ketiga variabel yang berperan dalam mendorong kebijakan suatu negara yang saling mempengaruhi satu sama lainnya melalui a) *Setting Internal*, b) *Social Structure and Behavior*, c) *Setting External*, sehingga d) *Decision Making Process* atau proses pembuatan kebijakan yang akan menghasilkan sebuah e) Action atau tindakan negara. Pertama *Setting Internal*, adanya hubungan lingkungan masyarakat atas perbedaan budaya dan kondisi sosial yang berbeda antara masyarakat domestik dan pekerja asing yang menimbulkan sejumlah respons dari masyarakat Jepang. Kemudian secara infrastruktur pemerintah mampu dalam menerima pekerja asing dengan transportasi umum, perumahan pemerintah dan keberadaan robot juga dapat menjadi pengganti peran manusia sehingga tidak diperlukan pekerja asing dengan jumlah yang banyak.

Kedua *Social Structure and Behavior* yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap pekerja asing menjadi tekanan politik, yang mana nilai umum yang telah tertanam di masyarakat sejak lama yaitu menganut nilai konfusius. Tidak hanya itu, orientasi nilai dan perilaku politik Jepang yang relevan dalam merumuskan pembuatan kebijakan pekerja asing menjadi faktor pendorong pemerintah Jepang dalam proses pembuatan kebijakan.



Ketiga *Setting External*, adanya kondisi dari luar yang mempengaruhi kebijakan suatu negara mulai dari adanya tekanan melalui respons AS, budaya barat yang dapat mempengaruhi dalam meningkatkan kesetaraan gender di Jepang secara perlahan. Tidak hanya itu kondisi masyarakat asing terutama Vietnam dan Filipina yang membutuhkan lapangan pekerjaan dan kondisi Jepang yang membutuhkan pekerja asing yang mana akan saling melengkapi satu sama lainnya. Ketiga variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya menjadi sebuah proses pembuatan kebijakan di Jepang didominasi dari faktor internal yaitu kondisi karena pada dasarnya pembentukan kebijakan luar negeri berasal dari kepentingan nasional. Sedangkan faktor eksternal yang tidak mendominasi, juga ikut berperan dalam mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, akhirnya pada masa pemerintahan Abe menghasilkan sebuah *action* atau tindakan yaitu mereformasi kebijakan terkait pekerja asing.

Pada 2012, strategi revitalisasi dengan merevisi kebijakan dasar terkait program pelatihan dan bagi pekerja yang memiliki keterampilan khusus disediakan lingkungan kerja yang baik. Pada 2016, berdasarkan *Japan Immigration Control Act* (ICA) yang menetapkan prosedur dalam menerima tenaga kerja asing dengan 3 kategori utama di antaranya yaitu mempromosikan penerimaan tenaga kerja asing dengan keterampilan khusus, program pelatihan praktik pekerja, tanggapan terhadap masyarakat internasional dan situasi internasional melalui *Economic Partnership Agreement* (EPA).

Pada 2018 pertama kalinya bagi Abe pada masa kepemimpinannya merevisi kembali kebijakan tenaga kerja asing dikenal sebagai *Immigration Act* yang mana

tidak lagi membedakan pekerja asing, dengan mengesahkan peraturan kebijakan berdasarkan 2 kategori visa. Pertama, pekerja dengan keterampilan khusus dapat membawa keluarga bahkan memperpanjang masa tinggal. Kedua pekerja teknis yang hanya memiliki visa 5 tahun dan tidak dapat membawa keluarga. Selain itu sejumlah masalah yang dihadapi para pekerja magang dan pelatihan mendorong komite yang ditunjuk oleh pemerintah akan mengusulkan berbagai solusi di antaranya yaitu untuk membuka jalan bagi pekerja asing dengan memberlakukan visa selama 5 tahun, upah yang setara dengan masyarakat Jepang dan kuota yang lebih banyak dalam menerima pekerja asing di Jepang (Fernando 2016). Dengan mereformasi kebijakan pekerja asing ini diharapkan dapat mewujudkan kepentingan nasional Jepang.

**Tabel 7. Konsep Snyder Sebagai Model Penelitian**

A	Internal Setting
1	Non-Human Environment <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastruktur <i>robotic</i></li> <li>- Transportasi umum</li> <li>- Perumahan Pemerintah</li> </ul>
2	Society <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opini dan sikap masyarakat Jepang terhadap keberadaan pekerja asing</li> </ul>
3	Human Environment <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan budaya dan jumlah antara populasi masyarakat domestic dan tenaga kerja asing</li> </ul>



B	Social Structure & Behavior
1	Major Common Value <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budaya konservatif dan nilai konfusius sebagai orientasi penduduk Jepang</li> </ul>
2	Major Institutional Patterns <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partai LDP yang berfokus pada nilai demokrasi</li> </ul>
3	Major Characteristic of Social Organization <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepentingan Kelompok</li> </ul>
4	Role Differentiations and Specialization <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan peran pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi kekosongan ketenagakerjaan</li> <li>- Spesialisasi yang dimiliki Jepang dapat berperan dalam membantu kekosongan ketenagakerjaan</li> </ul>
5	Group Kind and Function <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nippon dan JICA berperan dalam proses pembuaatan kebijakan.</li> </ul>
6	Relevant Social Process <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pembentukan opini, peran orang dewasa dalam melakukan sosialisasi, dan aksi maupun reaksi politik menjadi relevan dalam kelangsungan politik Jepang.</li> </ul>

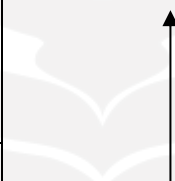
E	Setting Eksternal
1	Non-Human Environment <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kondisi negara-negara Eropa mempengaruhi kebijakan pekerja asing di Jepang</li> </ul>
2	Other Culture <ul style="list-style-type: none"> <li>-Budaya dari luar dianggap dapat menggeser budaya setempat</li> </ul>
3	Other Society <ul style="list-style-type: none"> <li>-Opini Amerika Serikat dan UNHCR</li> </ul>
4	Societies Organized and Functioning as States Government Action <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tindakan Jepang dalam merespon sejumlah kritikan dengan melakukan reformasi kebijakan</li> </ul>



C
Decision Making Process

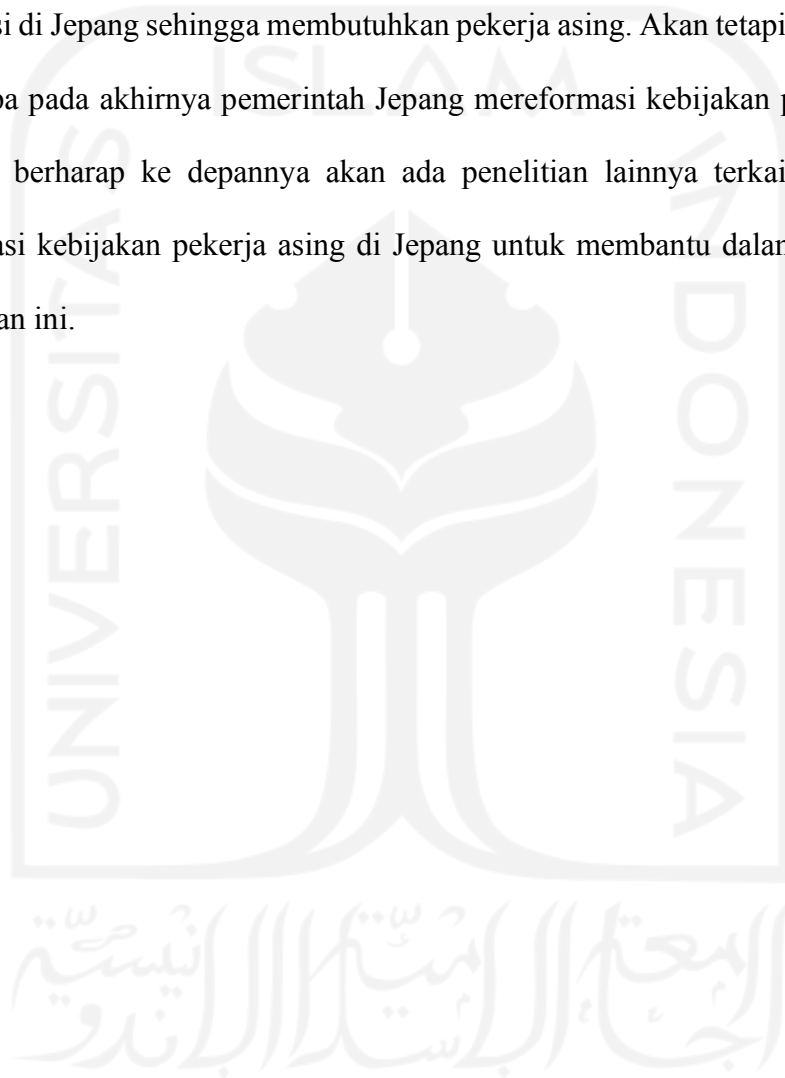


D
Action



## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masih belum banyak penelitian yang mengangkat faktor internal dan eksternal secara spesifik sebagai faktor pendorong dalam proses pembuatan kebijakan pekerja asing di Jepang. Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung menunjukkan faktor menurunnya populasi di Jepang sehingga membutuhkan pekerja asing. Akan tetapi tidak melihat mengapa pada akhirnya pemerintah Jepang mereformasi kebijakan pekerja asing. Penulis berharap ke depannya akan ada penelitian lainnya terkait berjalannya reformasi kebijakan pekerja asing di Jepang untuk membantu dalam melengkapi penulisan ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Br Karo, Mayang T., Ihsan Hikmatullah, Maudyda D. Puteri, Qotrun N. Aulia, and Nur S. Shafira. 2021. "Fenomena Shoushika: Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe." *TRANSBORDERS: International Relations Journal* Vol. 4 No. 2.
- Kusuma Pratiwi, Hidayanti D. 2014. "Kebijakan Pengendalian Imigrasi Sebagai Opsi Strategis Terhadap Fenomena Penuaan Populasi di Jepang." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* Vol. 3, No. 3.
- Abad, Michelle. 2023. "Japanese employers seek more skilled Filipino workers – Ople." *Rappler*, February 9, 2023. <https://www.rappler.com/nation/overseas-filipinos/susan-ople-says-japanese-employers-seek-more-skilled-filipino-workers/>.
- Alarabiya. 2018. "Japan enacts controversial law to accept foreign workers." *Al Arabiya*, December 8, 2018. <https://english.alarabiya.net/business/economy/2018/12/08/Japan-enacts-controversial-law-to-accept-foreign-workers>.
- Aqyla, Zhafira. 2021. "Cheap Governmental Housing for International Students with Family!" *Food Diversity*. [https://fooddiversity.today/en/article\\_84278.html](https://fooddiversity.today/en/article_84278.html).
- Asakura, Takuya, and Taro Tamaki. 2022. *Skilled foreign workers flocking to urban centers for higher pay | The Asahi Shimbun: Breaking News, Japan News and Analysis*, November 16, 2022. <https://www.asahi.com/ajw/articles/14761143>.
- BBC. 2020. "Kisah di balik kedekatan Jepang dengan robot yang dianggap 'tidak etis.'" *BBC*, March 3, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/vert-fut-51368008>.
- Bremner, Brian. 2015. "Home." *YouTube*, 2015. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-28/japan-unleashes-a-robot-revolution?leadSource=uverify%20wall>.
- Casanova, Guido A. 2022. "JAPAN Tokyo launches an advisory service to protect migrant workers." *AsiaNews*, May 28, 2022. <https://www.asianews.it/news-en/Tokyo-launches-an-advisory-service-to-protect-migrant-workers-55910.html>.
- Cohn, Vera. 2015. "How U.S. immigration laws and rules have changed through history." *Pew Research Center*, September 30, 2015. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/09/30/how-u-s-immigration-laws-and-rules-have-changed-through-history/>.
- Crawford, Mark. 2021. "Abe's Womenomics Policy: 2013-2020: Tokenism, Gradualism, or Failed Strategy?" *The Asia Pacific Journal* 19 (4).
- Curtis, Gerald. 2004. "Japanese Political Parties: Ideals and Reality\*."
- Daftary, Neil. 2021. "Japan moves to address abuse of migrant workers." *Anadolu Agency*, September 20, 2021. <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/japan-moves-to-address-abuse-of-migrant-workers/2369642>.
- Denyer, Simon. 2018. "Japan passes controversial new immigration bill to attract foreign workers." *The Washington Post*, December 7, 2018. [https://www.washingtonpost.com/world/japan-passes-controversial-new-immigration-bill-to-attract-foreign-workers/2018/12/07/a76d8420-f9f3-11e8-863a-8972120646e0\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/japan-passes-controversial-new-immigration-bill-to-attract-foreign-workers/2018/12/07/a76d8420-f9f3-11e8-863a-8972120646e0_story.html).

- Dev, Japan. 2022. "Japanese Work Culture: Here's How to Survive." *Japan Dev*, November 30, 2022. <https://japan-dev.com/blog/japanese-work-culture>.
- Fauzan, Muhammad R., and Satwika Paramasatya. 2022. "Upaya Jepang dalam Melindungi Tenaga Kerja Asing Pada Technical Intern Training Program."
- Fernando, Gavin. 2016. "Japan's foreign intern program: Foreign workers' forced labour | news.com.au — Australia's leading news site." *News.com.au*, May 23, 2016. <https://www.news.com.au/finance/business/travel/welcome-to-the-worlds-worst-internship/news-story/eeda395f79c84f4afde4744837724505>.
- Funakoshi, Minami. 2017. "Foreigners in Japan face significant levels of discrimination, survey shows." *Reuters*, March 30, 2017. <https://www.reuters.com/article/us-japan-discrimination-foreign-idUSKBN1720GP>.
- Ganelli, Giovanni, and Naoko Miake. 2015. "Foreign Help Wanted: Easing Japan's Labor Shortages; by Giovanni Ganelli and Naoko Miake; IMF Working paper 15/181; July 2015." International Monetary Fund. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15181.pdf>.
- Haris, Umiyati. n.d. "PEMBANGUNAN POLITIK DIFERENSIASI DAN SPESIALISASI."
- Herningtyas, Ratih. 2019. "TITLE PAGE SHINZO ABE'S POLICY TOWARD AGING POPULATION ISSUE (2012-2017)." <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/25741/7.%20CHAPTER%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>.
- Ho, Elsa. 2016. "Working in a Japanese company as a foreigner — An observation of Japanese workplace culture." *Medium*, January 18, 2016. <https://medium.com/@elsaho/working-in-a-japanese-company-as-a-foreigner-an-observation-of-japanese-workplace-culture-510c03148cc4>.
- Hollifield, James F., and Michael O. Sharpe. 2017. "Japan as an 'Emerging Migration State.'" *International Relations of the Asia-Pacific* 17.
- JICA. 2020. "Launch of the "Japan Platform for Migrant Workers toward Responsible and Inclusive Society" | Press Releases | News & Features." JICA. [https://www.jica.go.jp/english/news/press/2020/20201117\\_21.html](https://www.jica.go.jp/english/news/press/2020/20201117_21.html).
- Kadir, Drs. Gaul. 2014. [https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepository.ut.ac.id%2F4262%2F1%2FIPEM4434-M1.pdf&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=http%3A%2F%2Frepository.ut.ac.id%2F4262%2F1%2FIPEM4434-M1.pdf&btnG=).
- KAVEEVIVITCHAI, NITHI. 2019. "Japan's new foreign worker policy faces challenges." *Bangkok Post*, February 11, 2019. <https://www.bangkokpost.com/business/1627310/japans-new-foreign-worker-policy-faces-challenges>.
- Kawaguchi, Daiji, Yukiko Saito, and Daisuke Adachi. 2021. "Robots and employment: Evidence from Japan, 1978-2017." *CEPR*, February 9, 2021. <https://cepr.org/voxeu/columns/robots-and-employment-evidence-japan-1978-2017>.
- Koizumi, Masumi, Kazuaki Nagata, and Satoshi Sugiyama. 2019. "Foreign workers are on the way, but are Japanese businesses ready?" *The Japan Times*, March 31, 2019. <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/03/31/national/foreign-workers-way-japanese-businesses-ready/>.

- Krauss, Ellis S., and Robert J. Pekkanen. 2011. *The Rise and Fall of Japan's LDP: Political Party Organizations as Historical Institutions*.
- Kuchikomi. 2022. "Upwardly mobile Vietnamese crime groups being supplanted by new arrivals." *Japan Today*, December 26, 2022. <https://japantoday.com/category/features/kuchikomi/upwardly-mobile-vietnamese-crime-groups-being-supplanted-by-new-arrivals>.
- LANG, EUGENE. 2022. "Japan grapples with foreign worker protection as border reopens." *Nikkei Asia*, October 13, 2022. <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Comment/Japan-grapples-with-foreign-worker-protection-as-border-reopens>.
- Lin, Tom. 2022. "[聽寫] Why does Japan work so hard? CNBC explains." *Medium*, 2022. <https://medium.com/%E8%B7%8C%E8%B7%8C%E6%92%9E%E6%92%9E/%E8%81%BD%E5%AF%AB-why-does-japan-work-so-hard-cnbc-explains-3c36e128c2ad>.
- Littlejohn, Lauren J. 2017. "Confucianism: How Analects Promoted Patriarchy and Influenced the Subordination of Women in East Asia." <https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1120&context=younghistorians>.
- Mach, Nikolaus. 2020. "The rejuvenation of Japanese business culture (part 3) | JCO." *Japan Consulting Office*, 2020. <https://www.japanconsultingoffice.com/the-rejuvenation-of-japanese-business-culture-part-3/>.
- McCarthy, Niall. 2020. "Home." *YouTube*, 2020. <https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2020/09/28/rise-of-the-machines-the-countries-with-the-highest-density-of-robot-workers-infographic/?sh=5e6e39181308>.
- Morishita, Yuuna. 2021. "Japanese Work Ethic - Why Japan Has Such A Great Work Ethic." *THE JAPANESE WAY*, 2021. <https://thejapaneseway.com/japanese-work-ethic/>.
- Neely, Caylon. 2016. "The Japanese Political System." *Japan Industry News*, June 8, 2016. <https://www.japanindustrynews.com/2016/06/japanese-political-system/>.
- Nikkei. 2019. "18年の強制退去外国人、19%増 最多はベトナム." *日本経済新聞*, March 27, 2019. <https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42975400X20C19A3PP8000/>.
- Okuda, Kentaro. 2021. "How the Pandemic Forced Japan to Rethink Its Work Culture." *TIME*, August 11, 2021. <https://time.com/6084757/japan-sustainable-work-culture/>.
- Parker, Imogen. 2013. "Western Ideals of Gender Equality: Contemporary Middle Eastern Women." *E-International Relations*. <https://www.e-ir.info/2013/01/25/are-western-ideals-associated-with-gender-equality-relevant-to-an-understanding-women-in-contemporary-middle-eastern-societies/>.
- Pacific, Asia. 2022. "Japan to Review Controversial Technical Foreign Worker Program." *Asia Pacific Foundation of Canada*, November 29, 2022. <https://www.asiapacific.ca/publication/japan-review-controversial-technical-foreign-worker-program>.

- Rehm, Maximilien X., and Catherine Putz. 2022. "What Will Japan's Great Reopening Mean for Immigration Policy?" *The Diplomat*, November 11, 2022. <https://thediplomat.com/2022/11/what-will-japans-great-reopening-mean-for-immigration-policy/>.
- Rhasintya, Monica. 2020. "Analisis snyder dalam keputusan abstain Indonesia dalam sidang majelis umum PBB tahun 2013 mengenai perjanjian perdagangan senjata." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1 (2): 109-117.
- Saito, Jun. 2022. "Historical Background of the Japanese Restrictive Immigration Policy." Japan Center for Economic Research. <https://www.jcer.or.jp/english/historical-background-of-the-japanese-restrictive-immigration-policy>.
- Sari, Annisa Y. 2020. "Ketidaksetaraan Gender sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Jepang." *Journal of International Relations*, 6 (2).
- Shire, Karen A. 2009. "Socialization and Work in Japan: The Meaning of Adulthood of Men and Women in a Business Context." 8 (1): 77-92. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-6781.1999.tb00065.x>.
- Snyder, Richard C., H.W Bruck, and Burton Sapin. 2002. *Foreign Policy Decision Making*. New York: Palgrave Macmillan.  
10.1057/9780230107526.
- Stock, Bruce, and Kat Devlin. 2018. "Japanese views on immigrants, immigration, emigration." *Pew Research Center*, November 12, 2018. <https://www.pewresearch.org/global/2018/11/12/perceptions-of-immigrants-immigration-and-emigration/>.
- Subekti, Salshabila A., Yayuk Anggraini, and Rahmah Daniah. 2021. "Kebijakan Act on Promotion of Women's Participation and Advancement in the Workplace terhadap Pemberdayaan Perempuan di Jepang." *INTERDEPENDENCE JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES*.
- SUZUKI, WATARU. 2018. "Abe's cabinet approves plan to accept more foreign workers." *Nikkei Asia*, November 2, 2018. <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-immigration/Abe-s-cabinet-approves-plan-to-accept-more-foreign-workers2>.
- The Pinoy News. 2014. "13 Most Common Causes of Unemployment Rate in the Philippines." *The Pinoy OFW*, 2014. <https://thepinoyofw.com/unemployment-philippines/>.
- Toshihiro, Menju. 2020. "Can Japan Embrace Multiculturalism? | Nippon.com." *nippon.com*, February 19, 2020. <https://www.nippon.com/en/in-depth/d00534/can-japan-embrace-multiculturalism.html>.
- Ulasan, Fatih. 2022. "THE INFLUENCE OF CONFUCIANISM FOR PUBLIC ADMINISTRATION IN FAR EAST." <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2446095>.
- Uyen, Le, Cao Nguyen, and M. Kok. 2019. "Reasons behind the increase of Vietnamese working in Japan." *TalentHub*, June 18, 2019. <https://talenthub.jp/living-in-japan/reasons-for-increase-of-vietnamese-in-japan/>.



- Yamada, Masahiko. 2010. "The Current Issues on Foreign Workers in Japan." *Journal International Labour* 7 (3).  
[https://www.jil.go.jp/english/JLR/documents/2010/JLR27\\_yamada.pdf](https://www.jil.go.jp/english/JLR/documents/2010/JLR27_yamada.pdf).
- Qonita. 2019. Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Dalam Pemasangan Sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). *Journal of International Relations* 5 (4).

